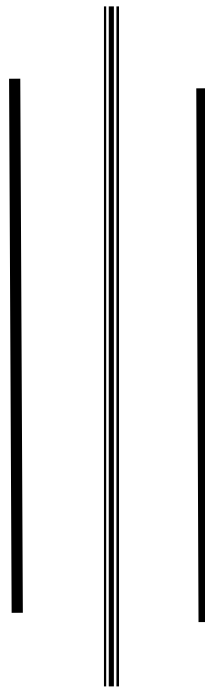


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESOR SUMBAWA BARAT



REVISI
RENCANA KERJA
POLRES SUMBAWA BARAT
T.A. 2021



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUMBAWA BARAT
NOMOR: KEP/55/VIII/2021, TANGGAL 31 AGUSTUS 2021



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUMBAWA BARAT

Nomor: KEP/55/VIII/2021

tentang

REVISI RENCANA KERJA POLRES SUMBAWA BARAT.A. 2021

KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUMBAWA BARAT

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Polres Sumbawa Barat pada tahun 2021, dipandang perlu menetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek;
8. Surat Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Nomor: B/4763/VII/REN.3.1./2021/Srena tanggal 10 Juli 2021 perihal *refocussing* dan realokasi belanja Polri T.A. 2021;

Memperhatikan.....

9. Surat Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Nomor: B/4780/VII/REN.3.1./2021/Srena tanggal 12 Juli 2021 perihal pagu *Reforcussing* dan realokasi belanja Polri T.A. 2021 tahap III Satker Mabes Polri dan Polda jajaran;
10. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Sumbawa Barat Nomor: Sprin/949/VIII/REN.1.3./2021 tanggal 27 Agustus 2021 perihal Tim Pokja Revisi Rencana Kerja T.A. 2021 Polres Sumbawa Barat.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Revisi Rencana Kerja Polres Sumbawa Barat T.A. 2021 sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini disahkan berdasarkan *Refocussing* tahap III T.A. 2021, untuk dijadikan pedoman dalam pembuatan Revisi Rencana Kerja Polres Sumbawa Barat T.A. 2021;
 2. Keputusan Kepala Kepolisian Resor Sumbawa Barat Nomor: Kep/20/VI/2020 tanggal 21 Juni 2020 tentang Rencana Kerja T.A. 2021 Polres Sumbawa Barat dinyatakan tidak berlaku lagi;
 3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taliwang
pada tanggal : 31 Agustus 2021



Kepada Yth:

- Kasubsatker Jajaran Res Sbw Brt.

HEBU MUSLIMIN, S.I.K., M.I.P.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78051226

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESOR SUMBAWA BARAT

DAFTAR ISI

BAB I	LATAR BELAKANG.....	
	1. Kondisi Umum	1
	2. Identifikasi Masalah	18
BAB II	RENCANA PEMBANGUNANJANGKA MENENGAH NASIONAL	
	3. RPJM (5 Arah Presiden RI).....	22
BAB III	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PRIORITASI.....	
	4. Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Prioritas Polda NTB.....	21
	5. Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Prioritas Polres Sumbawa Barat.....	21
BAB IV	ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI POLDA NTB & POLRES SBW BRT...	
	6. Arah Kebijakan & Strategi Polda NTB.....	23
	7. Arah Kebijakan & Strategi Polres Sumbawa Barat	36
	8. Program Prioritas Kapolri dan Kegiatan Prioritas Polri di Polres Sumbawa Barat	53
BAB V	PROGRAM/KEGIATAN, PAGU REFOCUSSING TAHAP III TAHUN 2021 DAN PROGRAM PRORITAS NASIONAL DAN HIBAH T.A. 2021 POLRES SUMBAWA BARAT.....	
	9. Program dan Kegiatan Polres Sumbawa Barat.....	59
	10. Anggaran Refocusing Polres Sumbawa Barat T.A. 2021	61
	11. Kegiatan Prioritas Polri TA. 2021.....	71
BAB VI	PENUTUP	
	12. Penutup	69

0000000000000000

**REVISI RENCANA KERJA
POLRES SUMBAWA BARAT
TAHUN 2021**

**BAB I
LATAR BELAKANG**

1. Kondisi Umum

Polri sebagai salah satu fungsi Pemerintahan di bidang keamanan yang bertanggung jawab terhadap Keamanan Dalam Negeri, sebagaimana rumusan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tugas pokok yaitu : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan Hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada Masyarakat.

Polres Sumbawa Barat berada di Kabupaten Sumbawa Barat terdiri dari 8 (Delapan) Kecamatan yaitu Kecamatan Sekongkang, Kecamatan Maluku, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Brang Ene, Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Seteluk dan Kecamatan Poto Tano, berada di wilayah hukum Polsek masing-masing yang sebagian dari wilayah Kecamatan tersebut memiliki wilayah laut seperti: Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluku dan Kecamatan Sekongkang mempunyai potensi dibidang perikanan dan merupakan sumber daya alam untuk sektor kepariwisataan. Dihuni penduduk yang Hitrogen terdiri dari berbagai Suku, Etnis, Agama, Adat Istiadat dengan berbagai karakteristik masing-masing, semua ini merupakan Kekayaan Bangsa, namun di sisi lain jika kondisi ini tidak disikapi dengan arif bijaksana dan tidak dengan pemahaman akan arti pluralisme akan menjadi potensi kerawanan untuk terjadinya peristiwa yang bernuansa Sara.

Memasuki tahun 2021, Polres Sumbawa Barat akan di hadapkan pada kondisi yang labil dan memerlukan pemikiran, kekuatan, keprofesionalan dan proporsional, untuk menghadapinya seperti kejahatan Konvensional, kejahatan

Transnasional, kejahatan terhadap kekayaan Negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi, diperkirakan akan meningkat, tingginya tingkat pengangguran, masih rendahnya daya beli masyarakat, dan kesenjangan sosial dari kondisi perekonomian Negara yang belum stabil, sehingga memerlukan perhatian khusus, kewaspadaan, kesabaran dalam mengatasinya sehingga gangguan Kamtibmas dapat terkendali. Dengan demikian dapat terjalin hubungan yang harmonis.

Selain langkah tersebut di atas tahun 2021 Polres Sumbawa Barat berencana menggelar Operasi Kepolisian kewilayahan seperti:

- a. Operasi Ketupat Gatarin 2021 sasarannya Pengamanan Idul Fitri 2021.
- b. Opearasi Lilin Gatarin 2021 sasarannya Pengamanan Hari Raya Natal 2019 dan Tahun Baru 2021.
- c. Operasi Jaran Gatarin 2021 sasarannya pemberantasan Curas, Curat dan Curanmor.
- d. Operasi Pekat Gatarin 2021 sasarannya Pemberantasan Penyakit Masyarakat
- e. Operasi Antik Gatarin 2021 sasarannya Pemberantasan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba
- f. Operasi Zebra Gatarin 2021 sasarannya Kamtibselcar Lantas jelang hari raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2021
- g. Operasi Simpatik Gatarin 2021 sasarannya Citra Simpatik Lantas Polri.
- h. Operasi Patuh Gatarin 2021 sasarannya Penanggulangan gangguan Kamtibcar dan Laka Lantas.
- i. Operasi Mantab Praja Gatarin 2021 sasarannya Keamanan dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah/Bupati Sumbawa Barat.

Menyikapi situasi dan kondisi keamanan di wilayah hukum Polres Sumbawa Barat yang terjadi selama ini, perlu kewaspadaan bagi personil karena sikon tersebut banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor Geografi, Demografi, Sumber Daya Alam, Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya maupun aspek Keamanan.

- a. Perkembangan aspek Kehidupan.

Perkembangan aspek Kehidupan berdasarkan Kirka Intel Polres Sumbawa Barat TA 2021 adalah sebagai berikut :

1) Potensi Gangguan

a) Geografi

- (1) Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat memiliki luas 1.849,02 Km² berada pada ketinggian berkisar antara 0 – 1.730 Meter diatas permukaan laut dan sebagian besar memiliki kemiringan lahan yang curam seluas 146.711 Hektar atau 79,35 % serta terdiri dari 8 (Delapan) Kecamatan antara lain Kecamatan Sekongkang, Kecamatan Maluk, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Brang Ene, Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Seteluk dan Kecamatan Poto Tano. Kabupaten Sumbawa Barat memiliki wilayah laut yang luas yang mempunyai potensi di bidang perikanan dan pantai yang sangat indah yang merupakan sumber daya alam untuk sektor kepariwisataan.
- (2) Komposisi daerah terdiri dari dataran rendah dan pegunungan. Daerah dataran rendah umumnya dimanfaatkan untuk lahan pertanian namun potensi kesuburan tanah kurang yang disebabkan peralihan musim yang tidak menentu dimana musim kemarau lebih panjang dibandingkan musim hujan. Dataran tinggi merupakan daerah yang labil, terutama akibat rusaknya lingkungan dan gundulnya hutan akibat perambahan hutan / Illega illegal Meaning.
- (3) Wilayah Sumbawa Barat merupakan wilayah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan umumnya berlangsung bulan November sampai dengan Maret (5 Bulan), sedangkan musim kemarau dari bulan April sampai Oktober (7 Bulan). Ratarata hari hujan di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017 berada pada rentang 3,40 sampai dengan 19,57 hari dengan curah hujan mencapai rata-rata 11,60 mm sampai dengan 253,63 mm

setiap bulannya dimana curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari yang mencapai rata-rata 253,63 mm. Rata-rata lama penyinaran matahari pada tahun 2017 mencapai 75,77 persen dengan kecepatan angin rata-rata 5,33 knots. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Sumbawa Barat adalah daerah kering, sehingga ketersediaan air merupakan faktor pembatas untuk pengembangan kegiatan ekonomi, terutama pertanian lahan kering.

- (4) Setiap tahun lahan pertanian yang subur semakin berkurang sebagai akibat tingginya laju pertumbuhan pembangunan fisik / infrastruktur di berbagai sector.

b) Demografi

- (1) Penduduk Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2020 sebanyak 144.707 jiwa yang terdiri atas 71.526 jiwa penduduk laki- laki dan 69.364 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2019, penduduk Sumbawa Barat mengalami pertumbuhan sebesar 2,79 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki- laki terhadap penduduk perempuan sebesar 103.
- (2) Kepadatan penduduk di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020 mencapai 76 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 8 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Maluk dengan kepadatan sebesar 155 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Sekongkang sebesar 27 jiwa/Km².

(3) Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Sumbawa Barat Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat pada Tahun 2017 sebesar 3.759 pekerja. Pencari kerja di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pada Tahun 2017 terbanyak terjadi pada bulan Agustus dan Desember. Hal tersebut sangat berkaitan dengan bulan kelulusan siswa sekolah dan lowongan pada PT AMNT. Pada Bulan Desember 2.011 pencari kerja terdaftar pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar pada dinas Sosial dan Tenaga Kerja berpendidikan terakhir SMA yaitu sebesar 72,36 persen (2.720 pekerja). Sedangkan untuk penduduk Kab Sumbawa Barat yang mengadu nasib ke Luar Negeri pada tahun 2014 berjumlah 1146 orang. Dimana sebanyak 835 orang bekerja di Oman, 146 orang bekerja di Bahrain, 37 orang bekerja di Saudi Arabia, 17 orang bekerja di Malaysia, 19 orang bekerja di Uni Emirat Arab dan 4 orang bekerja di Taiwan serta 88 orang bekerja di negara lainnya.

c) Sumber Daya Alam

Sumber daya alam Sumbawa Barat terdiri dari hutan, laut dengan pantainya, serta berbagai sumber alam lainnya yang berpotensi meningkatkan PAD dan perekonomian masyarakat apabila tidak dijaga dan dikelola secara benar justru sangat berpotensi menimbulkan kerawanan-kerawanan sebagai berikut :

(1) Luas hutan di Sumbawa Barat adalah 126.261,45 Ha terbagi atas 54.908,31 Ha hutan Lindung, 66.311,06 Ha hutan Produksi dan 5.042,08 Ha hutan Konservasi. Yang memiliki jenis tanaman hutan berupa kayu jati, sonokeling, asam, garu, selemam, bajur, Salam, Kelicung, Ipil, Piling, dan lain-lain. Pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terprogram atau tidak

terkendali yang tidak berwawasan lingkungan akan menimbulkan bencana alam bagi mahluk hidup yang ada seperti penebangan hutan secara liar dll. Kasus pencurian kayu / penebangan hutan dari waktu-kewaktu cenderung semakin meningkat tanpa memikirkan kepentingan jangka panjang , Penegakan hukum terhadap para pelaku perusak lingkungan hidup cukup sulit ditegakkan karena adanya jaringan yang cukup rapi.

- (2) Wilayah Sumbawa Barat dikelilingi oleh pantai yang sebagian sangat cocok untuk pengembangan budi daya mutiara, tambak ikan / udang yang dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak serta dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat karena mutiara maupun ikan yang dihasilkan selain dijual di dalam wilayah Sumbawa Barat maupun ke luar daerah. Disamping hal tersebut kondisi pantai juga berpotensi untuk pengembangan pariwisata seperti pantai Balat, Jelengah, Moro Kertasari, Poto Batu, Pasir Putih, Maluk, Sekongkang dan beberapa tempat yang belum dikelola secara maksimal.
- (3) Di Kabupaten Sumbawa Barat terdapat perusahaan tambang emas PT. Amman Mineral Nusa Tenggara yang memiliki areal tambang yang sangat luas sehingga pengelolaannya dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, keberadaan tambang tersebut telah dapat meningkatkan jumlah Devisa Negara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menampung tenaga kerja dalam jumlah banyak sekaligus mengurangi jumlah angka pengangguran, namun karena keterbatasan SDM yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia merupakan celah terjadinya penyimpangan oleh pihak perusahaan yang menimbulkan kerugian Negara. Disamping itu juga, tersedianya hutan yang cukup luas serta potensi

kekayaan laut yang cukup besar, dapat menimbulkan beberapa potensi gangguan seperti : perebutan lahan, penambangan liar, pencurian ikan, penyelundupan handak, pencurian Kayu / Illegal Logging, perambahan hutan dan perusakan lingkungan.

d) Ideologi

- (1) Masyarakat Kab. Sumbawa Barat memiliki komitmen melalui forum silaturahmi antar umat berbagai agama untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai satu-satunya Ideologi Nasional. Namun demikian, sejalan dengan perkembangan kehidupan demokrasi, timbul upaya dan keinginan dari kelompok masyarakat tertentu ingin menjalankan Ideologi tertentu yang berorientasi pada paham agama, paham liberal dan sosialis/komunis.

b. Politik

- (1) Di era reformasi saat ini, kesadaran Politik masyarakat semakin meningkat serta terciptanya iklim keterbukaan yang mengakibatkan masyarakat semakin kritis terhadap kebijakan Pemerintah. Kelompok / elemen masyarakat semakin berani menyampaikan pendapatnya melalui aksi unjuk rasa yang tidak jarang menimbulkan konflik horisontal maupun vertikal dan dapat menimbulkan gangguan kamtibmas.
- (2) Sengketa tapal batas antara wilayah masih menjadi polemik yang berkepanjangan dan belum ada penyelesaian tuntas, masing – masing daerah yang bersengketa mengklaim sebagai wilayahnya.

- (3) Terjadinya konflik internal Parpol akibat persaingan dan perpecahan pengurus Parpol pusat yang berdampak di daerah.
- (4) Potensi gangguan terkait dengan adanya kegiatan penyelenggaraan Pilkada tahun 2021 di Kab. Sumbawa Barat (jika pilkada ditunda akibat dampak virus Covid-19) yaitu :
 - a) Potensi gangguan yang bersumber dari penyelenggara Pemilu Kada / KPU dan perangkatnya.
 - b) Potensi gangguan yang bersumber dari masyarakat Konstituen.
 - c) Potensi gangguan yang bersumber dari penegakan hukum dan aparat keamanan serta kebijakan pemda.

c. Ekonomi

- (1) Adanya sejumlah lokasi di Kab. Sumbawa Barat yang memiliki kandungan logam mulia (emas) seperti di Bukit Lamunga Kec. Taliwang, Bukit Lamuntet di Brang Rea dan Bukit Tabeso di Sekongkang. Sebagian besar usaha penambangan emas tradisional di Sumbawa Kab. Sumbawa Barat melakukan kegiatan secara illegal dan tidak mengolah limbah yang dihasilkan secara baik/dibuang secara bebas..
- (2) Perkembangan harga BBM dalam negeri sangat tergantung pada fluktuasi perkembangan perekonomian global. Awal tahun 2020 harga minyak mentah dunia cenderung mengalami penurunan, Namun demikian fluktuasi harga BBM akan tetap terjadi sehingga sewaktu-waktu dapat terjadi kembali kenaikan harga BBM mengikuti harga minyak dunia. Terlepas dari hal tersebut diatas, dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan Negara khususnya di sektor pajak pemerintah akan berencana akan menaikkan tarif

pajak yang berasal dari PNBP seperti kenaikan pembuatan STNK dan BPKB.

- (3) Harga kebutuhan pokok masyarakat pada tahun 2021, masih akan diwarnai dengan kenaikan harga pada beberapa kebutuhan pokok seperti harga beras, cabai, minyak goreng, bawang merah dan putih serta gula pada saat terjadinya musim panca roba atau akibat cuaca ekstrim serta kelangkaan dan kenaikan harga pupuk pada saat musim tanam.
- (4) Masih lemahnya pengawasan terhadap distribusi dan harga pupuk menyebabkan seringnya terjadi kenaikan harga secara sepihak oleh para distributor/penjual pada saat musim tanam. Disamping juga adanya pemanfaatan oleh kelompok/pihak tertentu membuat pupuk palsu.
- (5) Belum terselesaikannya program konversi minyak tanah ke gas di wilayah Kab. Sumbawa Barat seperti yang telah dilaksanakan di wilayah Pulau Lombok, berdampak terhadap munculnya kelompok/pihak tertentu melakukan tindakan penyelewengan/penyelundupan minyak tanah bersubsidi dari Sumbawa Barat ke P. Lombok dan sebaliknya penyelundupan Gas Elpiji bersubsidi dari P. Lombok ke Sumbawa Barat..
- (6) Percepatan pembangunan ekonomi di wilayah Kab. Sumbawa Barat, salah satunya pembangunan infrastruktur kerap kali terhalang/dihadapkan oleh permasalahan ganti rugi tanah, seperti pembangunan airigasi aliran air Bendungan Bintang Bano di Kec. Brang Rea, Pembangunan Bendungan Tiu Suntuk di Kec.brang Ene dan Pembangunan Smelter di Kec. Maluk, pembangunan jaringan listrik tegangan tinggi dll.

d. Sosial Budaya

- (1) Wilayah Sumbawa Barat terdiri dari berbagai macam suku, adat istiadat serta fanatisme kedaerahan yang sempit disamping karakter masyarakat yang berbeda-beda, hal tersebut sangat menunjang terjadinya perkelahian yang benuansa SARA, dan labil terhadap provokator mengarahkan kepentingannya.
- (2) Permasalahan aliran keagamaan, munculnya aliran kepercayaan/agama di wilayah Kab. Sumbawa Barat masih belum mendapatkan dukungan dari masyarakat karena adanya pemahaman/penilaian bahwa aliran kepercayaan/ agama dimaksud melanggar dari kaidah agama secara umum dan dianggap sesat.
- (3) Berkembangnya berbagai paham / aliran agama di Sumbawa Barat akan mengundang reaksi penentangan / penolakan oleh masyarakat luas sehingga sangat rawan terjadinya aksi-aksi anarkhis seperti pengusiran paksa, perusakan dan pembakaran terhadap rumah tempat tinggal dan tempat ibadah serta konflik diantara umat beragama.
- (4) Permasalahan bidang pendidikan yang sering muncul terkait dengan honorer guru dan dana BOS serta system zonasi dalam hal penerimaan siswa yang masih menjadi isu/tuntutan kedepan.
- (5) Maraknya penyebaran ujaran kebencian serta pemberitaan- pemberitaan bohong/hoax melalui Medsos yang mengarah kepada provokasi, pembentukan/penggiringan opini negative, penghinaan/pelecehan serta kerawanan SARA saat ini semakin mengkhawatirkan, yang sangat sulit dibendung meskipun himbauan dan upaya-upaya penegakan hukum telah dilakukan untuk memberikan efek jera, namun semakin berkembang. Beberapa akibat dari pemberitaan

hoax dan provokasi melalui Medsos yang baru-baru terjadi di wilayah Kab. Sumbawa Barat. Dalam perkembangannya kemudian meluas dan berkembang melibatkan desa-desa lainnya akibat adanya pemberitaan hoax dan provokasi melalui Medsos..

e. Keamanan

(1) Kasus kriminalitas yang jumlahnya tergolong masih tinggi, cenderung meningkat dari tahun ke tahun, antara lain :

- Curat, Curas, Cubis, dan Curanmor.
- Penggelapan dan Penipuan.
- Penganiayaan Ringan, Penganiayaan Biasa dan Penganiayaan Berat.
- Perjudian.
- Perbuatan Cabul/Pemeriksaan.
- Penghinaan.
- Penyalahgunaan Narkoba.

(2) Kab. Sumbawa Barat merupakan daerah yang mempunyai kecenderungan dijadikan sebagai tempat perekrutan, pelatihan, tempat persembunyian atau sebagai sasaran _teror, indikasinya tumbuh dan berkembangnya kelompok-kelompok radikal serta terjadinya beberapa kasus teror terhadap masyarakat dan aparat keamanan, disamping itu adanya mantan napiter pelaku terorisme berasal dari wilayah kab. Sumbawa barat seperti dari Kec. Seteluk yang saat ini masih melakukan kegiatan kajian secara diam diam bersama rekan-rekannya.

(3) Masyarakat mudah main hakim sendiri terhadap para pelaku kejahatan yang berhasil ditangkap meskipun kadangkala pelaku sudah ditahan/diamankan oleh pihak Polri.

2) Kerawanan Kamtibmas (Ambang Gangguan)

a) **Geografi**

- (1) Wilayah Pulau Kecil yang tidak berpenghuni dijadikan sebagai tempat potensial untuk pengembangan pariwisata dan persinggahan bagi masyarakat baik nelayan maupun orang asing serta belum terdapat pos-pos pengamanan secara merata.
- (2) Letak wilayah Kab. Sumbawa Barat yang dibatasi oleh samudra Indonesia dan samudra Hindia, berdekatan dengan negara Australia. Perbatasan wilayah laut Kab. Sumbawa Barat juga sangat potensial dijadikan sebagai jalur transit kapal-kapal asing, perekonomian dan banyak terdapat hasil laut.
- (3) Masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari bertani semakin terpinggirkan akibat berkurangnya lahan pertanian, banyak dari mereka kini menjadi pengangguran. Disamping itu juga pembangunan infrastruktur dan perumahan yang menggunakan lahan pertanian banyak mendapatkan tentangan/kritik dari kalangan pemerhati lingkungan dan LSM.

b) Demografi

- (1) Penyebaran penduduk tidak merata yang sebagian besar terpusat di kota taliwang sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian Kab. Sumbawa Barat, namun akibat tingkat IPM yang rendah mengakibatkan kalah bersaing dengan masyarakat lain dan terjadi penumpukan jumlah penduduk di perkotaan.
- (2) Setiap tahun jumlah angka pengangguran semakin meningkat yang tidak sebanding dengan jumlah ketersediaan lapangan kerja, sementara kebutuhan hidup masyarakat semakin meningkat.
- (3) Masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan, belum mendapat perhatian dari pemerintah, sementara karakteristik dan temperamen masyarakat sangat keras dan mudah terprovokasi.
- (4) Keberagaman etnis, suku, agama serta adat istiadat dan budaya yang berbeda kadangkala memunculkan sikap fanatisme yang berlebihan dari kelompok masyarakat tertentu yang hidup berbaur dan berdampingan dengan masyarakat lainnya.

c) Sumber Daya Alam

- (1) Terdapat perusahaan tambang emas di wilayah Kab. Sumbawa Barat yang keberadaannya mendapat tentangan dan penolakan masyarakat terjadi di wilayah Kec. Maluk dan Sekongkang.
- (2) Sumber berbagai jenis tambang yang potensial antara lain tambang emas, mangaan, pasir besi,

maupun batu granit yang sampai saat ini masih belum sepenuhnya dieksplorasi secara resmi oleh pemerintah, tetapi sebagian dieksplorasi oleh masyarakat secara ilegal yaitu di daerah Lamunga, Pakirum dan Lamuntet.

d) **Ideologi**

- (1) Sikap masyarakat Sumbawa Barat yang permisif, mudah menerima dan mengikuti orang-orang yang berpakaian ala timur tengah/berlabel agama.
- (2) Keadaan masyarakat yang fanatik sempit dalam pemahaman dan penerapan ajaran agama yang dianut.
- (3) Tidak adanya lembaga yang diberikan tugas untuk mensosialisasikan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 setelah BP 7 dibubarkan.
- (4) Adanya wacana sebagian kecil masyarakat yang menginginkan diberlakukannya Syariat Islam sebagai hukum positif di wilayahnya.

e) **Politik**

- (1) Kebijakan pemerintah baik pusat dan daerah belum sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat, dimana masyarakat belum merasakan perubahan yang lebih baik terutama di sektor ekonomi, masyarakat masih menemui kesulitan untuk mendapatkan lapangan kerja yang layak, angka pengangguran tidak berkurang, pendidikan gratis belum jadi kenyataan dan sebagainya.
- (2) Keinginan/tuntutan masyarakat Kab. Sumbawa Barat untuk membentuk Propinsi sendiri sudah mulai disuarakan sejak tahun 2009 dan telah mendapatkan dukungan dari para Bupati/Walikota serta anggota Legislatif se Pulau Sumbawa.
- (3) Tapal batas yang disengketakan merupakan daerah potensial baik untuk pengembangan wisata, potensial untuk pertambangan dan potensial dengan hasil hutannya dan berlarut-larutnya penyelesaian tapal batas oleh pemerintah dan belum ada kesepakatan yang dicapai diantara pihak-pihak yang bersengketa.
- (4) Permasalahan-permasalahan internal Parpol yang berpengaruh terhadap kegaduhan politik memicu meningkatnya suhu politik. Adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan akan dimanfaatkan oleh para lawan politik untuk memprovokasi masyarakat dalam menjatuhkan pemerintah

f) **Ekonomi**

- (1) Belum ada Perda yang mengatur penanganan, pengolahan tambang rakyat, pemerintah tidak tegas untuk menertibkan tambang ilegal yang dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Masyarakat penambang tidak memahami akibat yang ditimbulkan terhadap lingkungan, pembuangan limbah penambangan logam mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia, hewan dan lingkungan hidup.
- (3) Keinginan masyarakat disekitar tambang untuk dapat dipekerjakan dalam perusahaan tambang serta adanya para tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda yang ingin mendapatkan akses dari kegiatan tambang.
- (4) Munculnya aksi-aksi unjuk rasa menuntut dipekerjakan menjadi pekerja tambang pada perusahaan-perusahaan pertambangan.
- (5) Diproyeksikan harga minyak dunia akan mengalami kenaikan seiring dengan perekonomian global semakin membaik sehingga harga BBM bersubsidi dalam negeri berpeluang dinaikkan pemerintah sehingga berimplikasi juga terhadap wilayah Kab. Sumbawa Barat.

g) Sosial Budaya

- (1) Keanekaragaman suku dan agama yang terdapat di wilayah Kab. Sumbawa Barat berpengaruh terhadap :
 - a) Masing-masing suku/etnis yang tinggal di Kab. Sumbawa Barat memiliki adat istiadat dan budaya yang beragam.
 - b) Masalah agama dan keyakinan adalah masalah yang sensitif memicu terjadinya pertentangan dan salah pengertian.
 - c) Tidak jarang persoalan terkait dengan keyakinan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik.
 - d) Kontroversi atas diberlakukannya Surat Keputusan Bersama Dua Menteri antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 tentang pendirian tempat ibadah. Dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk melakukan penolakan terhadap keberadaan/penolakan pembangunan tempat ibadah tertentu.
- (2) Semakin berkembangnya dunia pariwisata di Kab. Sumbawa Barat dipengaruhi oleh :
 - a) Dibangunnya berbagai infrastruktur penunjang dan berbagai kemudahan birokrasi termasuk berbagai macam promosi baik dalam maupun luar negeri.
 - b) Bermunculan investor/bisnis penunjang sektor wisata seperti penginapan/hotel, restaurant,

tempat hiburan dan berbagai bisnis bidang jasa.

- c) Disamping pengaruh tersebut di atas, meningkatnya pariwisata Kab. Sumbawa Barat akan berdampak terhadap masuknya budaya barat yang belum tentu sesuai dengan budaya lokal, serta meningkatnya harga tanah di lokasi-lokasi pariwisata terutama di daerah-daerah strategis.
- (3) Aliran/keyakinan dalam suatu agama seringkali menimbulkan konflik karena masyarakat belum terbiasa dengan suatu perbedaan terkait dengan keyakinan meskipun tidak prinsip dan kelompok-kelompok tersebut bukan merupakan aliran sesat, masyarakat Islam terutama yang pengetahuan agamanya masih dangkal menganggap keyakinan kelompok tersebut sesat.
- (4) Adanya elemen masyarakat yang memperingati hari-hari besar tersebut dengan cara yang berlebihan dan dimanfaatkan sebagai momen untuk kepentingan tertentu baik untuk kepentingan pribadi/kelompok.

h) **Keamanan**

- (1) Tingginya kasus kriminalitas dipengaruhi oleh :
 - a) Banyak kasus kriminal yang belum terungkap sehingga para pelaku masih berkeliaran bebas.
 - b) Perilaku aparat penegak hukum yang mudah dipengaruhi, disogok oleh terdakwa dalam penanganan kasus dan dijadikan lahan untuk mencari keuntungan pribadi, mengingat aparat penegak hukum kurang profesional dalam menangani kasus.
- (2) Terjadinya perkelahian antar kelompok/kampung dilatarbelakangi :Banyak kasus kriminal yang belum terungkap sehingga para pelaku masih berkeliaran bebas.
 - a) Rasa dendam lama yang berkepanjangan dan kampung yang bertikai karena pernah disakiti namun tidak ada penyelesaiannya dari aparat terkait dan seolah-olah melakukan tindak pidana tidak ada sanksi hukum.
 - b) Adanya provokasi dari oknum aparat yang tidak menginginkan situasi kondusif dan sekaligus untuk menjatuhkan wibawa aparat yang menanganinya.

- (3) Semakin berkembangnya teknologi serta pengetahuan masyarakat menjadi salah satu faktor pemanfaatan oleh kelompok pelaku kejahatan untuk melakukan tindak kejahatan dengan modus operandi baru dan beragam.

b. Analisa SWOT

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Polres Sumbawa Barat dalam rangka melaksanakan fungsi keamanan tersebut dapat dianalisa dari faktor-faktor baik dari lingkungan Intern maupun ekstern melalui analisa SWOT, yaitu :

1) Kekuatan (internal)

Kekuatan Personel Polres Sumbawa Barat sampai bulan Juni tahun 2020 berupa sumber daya manusia, materil dan fasilitas. jumlah Personel sebanyak 457 orang, terdiri dari : AKBP 1 orang, Kompol 3 Orang, AKP 5 Orang, Inspektur 26 Orang, Bintara 422 orang dan PNS 1 orang, dengan komposisi kepangkatan terdiri dari Golongan IV 1 Orang, Golongan III 21 orang, dan Golongan II 423 orang. prediksi penambahan kekuatan personel Polres Sumbawa Barat Tahun 2020 sebanyak 7 orang dan perkiraan pengurangan karena pensiun, meninggal, PTDH dan mutasi sebanyak 5 orang menjadi 467 orang.

Dari peralatan standard untuk melaksanakan tugas–tugas Operasional meliputi Kendaraan Roda 2 sebanyak 161 unit, Roda 4 sebanyak 342 unit dan Roda 6 sebanyak 11 unit, Senjata api sebanyak 59 pucuk dan Alkom sebanyak 62 buah.

2) Kelemahan (internal)

Di dalam operasionalisasi kegiatan Polres Sumbawa Barat terkendala pada keterbatasan Sumber Daya Manusia, Materil dan fasilitas. yang belum tercukupi sehingga kecepatan memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama saat mendatangi TKP belum optimal, ini disebabkan oleh Administrasi Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat yang berjauhan antar wilayah Kecamatan demikian juga antara Polsek yang satu dengan Polsek Yang lainnya.

3) Peluang (eksternal)

Adanya Sistem Desentralisasi / Otonomi Daerah dapat mendekatkan pelayanan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kepada masyarakat saling menunjang dengan kontribusi Polri Polres Sumbawa Barat. Disamping itu peluang yang lain adalah partisipasi publik dalam setiap upaya Perpolisian Masyarakat termasuk kesediaan membantu dalam mengungkap perkara.

4) Ancaman (eksternal)

Ancaman yang ada di wilayah Polres Sumbawa Barat adalah angka pelanggaran dan kriminalitas yang masih tinggi menyangkut beberapa golongan / jenis, yaitu :

- a) Kejahatan konvensional yang langsung dirasakan oleh rakyat banyak meliputi : kebakaran / pembakaran, pemalsuan surat, kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan, merusak / melanggar kesopanan, perkosaan / perbuatan cabul, judi, penghinaan, penganiayaan / anirak, kejahatan mengakibatkan orang mati, kejahatan mengakibatkan orang luka – luka, menghasut untuk melakukan tindak pidana, cubis, curat, curas, curanmor, pemerasan dan pengancaman, penggelapan, penipuan, pengrusakan / merusak barang, penadahan, penemuan mayat, dan miras. Kejahatan transnasional termasuk terorisme yang menimbulkan dampak politis dan psikologis serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA).
- b) Kejahatan terhadap kekayaan negara meliputi korupsi, pembalakan liar / pencurian kayu, pencurian ikan, penyelundupan dan penambangan liar .
- c) Kejahatan yang berimplikasi kontijensi seperti perkelahian antar kelompok berdampak pada gangguan keamanan yang meluas sehingga memerlukan pengerahan kekuatan besar untuk menanggulangnya.
- d) Ancaman terorisme masih akan menjadi ancaman serius pada tahun 2021 tidak terkecuali di daerah Kab. Sumbawa Barat, terindikasi dari adanya para pelaku dari Kab.

dalam beberapa aksi pengeboman di Indonesia, mayoritas masyarakatnya yang beragama Islam dan cenderung bersikap permisif sangat mudah terpengaruh dan terprovokasi terhadap isu-isu / ajakan yang mengatasnamakan Islam serta merupakan daerah / tempat tujuan wisatawan asing dari mancanegara. Disamping itu juga semakin terpojoknya para pelaku tindak terorisme di wilayah Pulau Jawa menjadikan NTB sebagai tempat pelarian/persembunyian maupun pembangunan kekuatan kelompok terorisme.

2. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah Hukum Polres Sumbawa Barat, antara lain :

- a. Masih adanya kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan Negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi yang terjadi di wilayah hukum Polres Sumbawa Barat
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat Sumbawa Barat tentang masalah pentingnya keamanan.
- c. Masih adanya 1 (satu) wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat yang belum ada Polseknya.
- d. Masih kurangnya Personel pada tingkat Polres maupun Polsek.
- e. Perilaku Masyarakat yang kurang mendukung terhadap penegakan hukum di wilayah Polres Sumbawa Barat.
- f. Masih terbatasnya sarana prasarana terutama kendaraan R2 dan R4 serta alat komunikasi (Alkom) di tingkat Polres dan Polsek.
- g. Persentase laju tingkat perkembangan penduduk masih dirasakan sangat cepat dibandingkan dengan tingkat kecepatan laju perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, akibatnya membawa dampak Keamanan.
- h. Dampak rencana penghentian kontrak kerja pegawai PT AMNT
- i. Meskipun secara umum situasi Kamtibmas di wilayah Sumbawa Barat cukup kondusif namun masih ada gangguan Kamtibmas yang menonjol seperti perkelahian antar kelompok / kampung.

- j. Kuantitas pemerataan dan terjangkaunya pelayanan Polri yang relatif belum optimal.
- k. Tingginya indikator kriminalitas dengan kemampuan selesai relatif rendah.
- l. Masih kecilnya jumlah anggota yang telah memiliki kualifikasi kejuruan (Dik Spesialisasi).
- m. Masih banyaknya personil Polri yang belum menguasai teknologi Informasi dan komputer / Internet terutama bagi para penyidik (New Demension Crime)

BAB II**RPJM (RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL)
DAN PROGRAM PRIORITAS KAPOLRI****3. Arahannya Presiden Republik Indonesia**

Guna terwujudnya "Indonesia Maju" yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong maka Presiden Republik Indonesia menentukan arah utama sebagai berikut:

- a. **Pembangunan Sumber Daya Manusia:**
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
- b. **Pembangunan Infrastruktur:**
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
- c. **Penyederhanaan Regulasi:**
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
- d. **Penyederhaan Birokrasi:**
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
- e. **Transformasi Ekonomi:**
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAB III
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PRIORITAS POLDA NTB
DAN POLRES SUMBAWA BARAT

4. Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Prioritas Polda NTB

- a. Visi “Terwujudnya keamanan dan ketertiban di daerah hukum Polda Nusa Tenggara Barat”
- b. Misi
“Melindungi, Melayani dan Mengayomi masyarakat dilingkungan Nusa Tenggara Barat”
- c. Tujuan
 - 1) Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Barat;
 - 2) Menegakkan hukum secara berkeadilan;
 - 3) Mewujudkan Polda Nusa Tenggara Barat yang professional;
 - 4) Modernisasi pelayanan Polda Nusa Tenggara Barat;
 - 5) Menerapkan manajemen Polda Nusa Tenggara Barat yang terintegrasi dan terpercaya.
- d. Sasaran Prioritas
 - 1) Harkamtibmas yang kondusif guna menjaga stabilitas Kamtibmas dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi sosial termasuk di wilayah hukum Polda NTB;
 - 2) Mengoptimalkan pelayanan publik Polda NTB;
 - 3) Penegakan hukum secara berkeadilan dan terpercaya di wilayah Nusa Tenggara Barat;
 - 4) Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polda NTB;
 - 5) Pemenuhan Almatsus Kepolisian yang modern secara bertahap dan berkelanjutan di Polda NTB;
 - 6) Regulasi dan sistem pengawasan yang efektif dan terpercaya di wilayah hukum Polda NTB.

5. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Prioritas Polres Sumbawa Barat

- b. Visi “Terwujudnya keamanan dan ketertiban di daerah hukum Polres Sumbawa Barat”
- c. Misi
“Melindungi, Melayani dan Mengayomi masyarakat dilingkungan Polres Sumbawa Barat”

- c. Tujuan
- 1) Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kab. Sumbawa Barat;
 - 6) Menegakkan hukum secara berkeadilan;
 - 7) Mewujudkan Polres Sumbawa Barat yang professional;
 - 8) Modernisasi pelayanan Polres Sumbawa Barat;
 - 9) Menerapkan manajemen Polres Sumbawa Barat yang terintegrasi dan terpercaya.
- d. Sasaran Prioritas
- 1) Harkamtibmas yang kondusif guna menjaga stabilitas Kamtibmas dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi sosial termasuk di wilayah hukum Polres Sumbawa Barat;
 - 2) Mengoptimalkan pelayanan publik Polres Sumbawa Barat;
 - 3) Penegakan hukum secara berkeadilan dan terpercaya di wilayah Kab. Sumbawa Barat;
 - 4) Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polres Sumbawa Barat;
 - 5) Pemenuhan AlmatSus Kepolisian yang modern secara bertahap dan berkelanjutan di Polres Sumbawa Barat;
 - 6) Regulasi dan sistem pengawasan yang efektif dan terpercaya di wilayah hukum Polres Sumbawa Barat.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI POLDA NTB DAN POLRES SUMBAWA BARAT

6. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI POLDA NTB

Guna mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polda NTB Tahun 2021, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

a. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Harkamtibmas yang Kondusif guna Menjaga Stabilitas Kamtibmas dalam rangka Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial di Wilayah Provinsi NTB”**, yaitu:

- 1) peran intelijen Polda NTB dalam menjaga Kamtibmas melalui peningkatan deteksi aksi; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
meningkatkan kemampuan deteksi aksi (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) fungsi intelijen keamanan Polda NTB yang didukung personel, anggaran dan teknologi intelijen yang memadai guna menurunkan dan mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial (giat3112, 3114, 3115, 3116, 3117, 3150/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- 2) meningkatkan pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas serta terorisme; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) melanjutkan penguatan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan; (giat5076/prog4/SP1/SS1/ IKU1);
 - b) meningkatkan penyuluhan kontra radikal kepada Ormas/ komunitas perempuan, *workshop* pencegahan kejahatan, melanjutkan pelatihan Tim Sosialisasi Kejahatan Cyber; (giat5076/prog4/SP1/ SS1/IKU1);
 - c) penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media sosial serta kerja sama dengan instansi terkait serta pemanfaatan mantan-mantan teroris yang sudah Pancasila untuk membantu menyadarkan masyarakat yang berpaham radikal; (giat5076/ prog4/SP1/ SS1/IKU1);

- d) melaksanakan kerja sama dan identifikasi terhadap individu atau kelompok serta melakukan sosialisasi terhadap mantan narapidana terorisme dengan keluarganya. (giat5076,3143/prog4,11/SP1/SS1/ IKU1);
- 3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui "*Community Policing*"; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) peningkatan pemberdayaan pengembalian kewenangan kepolisian terbatas kepada BUJP dan Satpam; (giat5076/prog4/SP1/SS1/ IKU1);
 - b) pembinaan eksistensi FKPM/Pokdar Kamtibmas dan asistensi penguatan KBPPP. (giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- 4) penanganan konflik secara humanis; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pemberian penyuluhan kontra radikal kepada ormas/komunitas perempuan guna turut berpartisipasi meredam gejolak sosial yang terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial; (giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1);
 - b) pelaksanaan kontinjensi dengan pergelaran pasukan dalam rangka operasi kepolisian untuk penanganan konflik sosial. (giat5079/prog4/SP1/SS1/IKU1).
- 5) meningkatkan peran Polri di wilayah rawan bencana dan wabah; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pelaksanaan kontinjensi dengan pergelaran pasukan dalam rangka operasi kepolisian di wilayah rawan dan bencana; (giat5079/prog4/ SP1/SS1/IKU1);
 - b) menyiapkan personel Polda NTB yang mampu digerakkan dalam menghadapi ketanggapsegeraan serta membangun sinergisitas kemitraan dengan *stakeholder* dalam penanggulangan bencana; (giat5079/prog4/SP1/SS1/IKU1);
 - c) memenuhi perlengkapan Bhabinkamtibmas terutama yang mendukung tugas pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam sosialisasi mitigasi bencana; (giat5076/prog4/SP1/SS1/ IKU1);

- d) bersama-sama instansi terkait bekerja sama membangun pusat penanganan bencana, kesehatan dan mengawasi pembagian bantuan bencana kepada masyarakat melalui kegiatan Bakti Kamtibmas. (giat3072,5076/prog1,4/SP1/SS1/IKU1);
- 6) mewujudkan Kamseltibcarlantas; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan sosialisasi budaya tertib Lalu Lintas; (giat3133/prog4/ SP1/SS1/IKU1);
 - b) melaksanakan pembangunan Indonesia *Safety Driving Center* (ISDC); (giat3133/prog4/SP1/SS1/IKU1);
 - c) melaksanakan pembangunan RTMC/TMC; (giat3133/prog4/SP1/SS1/ IKU1);
 - d) pemasangan ETLE; (giat3133/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- 7) terlaksananya pengamanan *event* nasional/internasional tahun 2021; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- pelaksanaan operasi kepolisian dalam rangka pengamanan *event* nasional/Internasional tahun 2021; (giat5079/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- 8) penggelaran operasional dan *back up* kewilayahan personel di jajaran Polda NTB dalam rangka pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan menjalin sinergisitas polisional; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) kesiapan personel Polda NTB untuk mampu di gerakan secara cepat dalam rangka pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan lawan insurjensi; (giat5087/prog4/SP1/SS1/IKU1);
 - b) melaksanakan sistem rayonisasi dalam rangka penanganan tahap awal penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi; (giat5087/ /SP1/SS1/IKU1);
 - c) membangun sinergisitas dengan satuan kewilayahan dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang aktif guna mewujudkan situasi keamanan dalam negeri yang kondusif. (giat5087/prog4/ SP1/SS1/IKU1);
- 9) peningkatan kerja sama dengan instansi terkait; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) pembuatan MOU dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan sinergi polisional; (giat3120/prog4/SP1/SS1/IKU1);
 - b) peningkatan kerja sama polisional dalam rangka kerja sama dengan instansi terkait guna meningkatkan pelayanan prima Polda NTB di masyarakat (giat3122/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- 10) penggelaran patroli kapal Polri di wilayah Pariwisata dan perairan di wilayah hukum Polda NTB guna mendukung terlaksananya pengamanan laut; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- patroli kapal Polri di seluruh wilayah perairan dan sepanjang garis pantai untuk melaksanakan pengamanan perairan dan penegakan hukum; (giat3134/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- b. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Mengoptimalkan Pelayanan Publik Polda NTB”**, yaitu:
- 1) pengembangan sarana prasarana pelayanan publik yang berbasis TIK; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) pembangunan dan peningkatan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan, baik di tingkat Polda maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada aparaturnya Polri dan masyarakat umum; (giat3072/prog1/SP2/SS5/IKP11);
 - b) mengusulkan pembangunan ruang RPK di Polres sesuai dengan SPM yang terintegrasi secara *online*; (giat3071,3084/prog1,2/SP2/SS4/ IKP4);
 - c) melaksanakan pengajuan pengadaan Alsuspol yang modern dan berbasis TIK; (giat3071,3084/prog2/SP2/ SS4/IKP4);
 - d) peningkatan pelayanan *online* yang terintegrasi serta pelayanan keliling bidang lintas yang lebih menjangkau masyarakat dan pelayanan identifikasi sebagai alat kontrol dan data forensik kepolisian; (giat3071,3084/prog1,2/SP2/ SS5/IKP11);
 - e) pengembangan registrasi dan identifikasi dengan memberikan jaminan legitimasi atas kemampuan pengemudi dan kendaraan bermotor; (giat3071/prog4/SP1/ SS5/IKP11);

- f) melanjutkan inovasi layanan yang efisien dan terintegrasi; (giat5060/prog2/SP2/SS5/IKP11);
- 2) peningkatan profesionalisme Polri dalam pelayanan dan sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melakukan penilaian kepuasan layanan kedokteran dan kesehatan Polri pada Rumkit dan poliklinik jajaran Polda NTB; (giat3072/prog1/ SP2/ SS5/IKP11);
 - b) melaksanakan pelayanan surat izin operasional BUJP melalui pelayanan satu pintu di BKPM; (giat5079/prog9/SP2/SS5/IKP11);
 - c) melaksanakan pelatihan revolusi mental dibidang pelayanan. (giat3100/prog5/SP2/SS5/IKP11).
- c. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “**Penegakan Hukum Secara Berkeadilan dan Terpercaya**”, yaitu:
- 1) peningkatan profesionalisme dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) meningkatkan koordinasi keamanan laut antar penyidik di wilayah Polda NTB; (giat3134/prog4/SP3/SS2/IKU2);
 - b) melakukan penyelidikan yang berhubungan dengan hakikat ancaman tindak pidana terorisme, penindakan serta penyidikan tindak pidana terorisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (giat3143/prog5/SP3/SS2/IKU2);
 - c) meningkatkan pemberantasan 4 jenis kejahatan dengan prioritas tindak pidana korupsi, Narkoba (TPPU), terorisme, Karhutla/LH serta Siber termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak (giat3140,3141,3142,3143,3144,3145,3146, 5083 prog5/SP3/ SS2/IKU2);
 - d) melanjutkan dan meningkatkan cakupan data serta kemampuan pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam pengolahan tempat kejadian perkara (*Crime Scene Investigation*); (giat3141/prog5/SP3/ SS2/IKU2);

- e) melanjutkan pemantauan, pemetaan, dan penangkapan gembong teroris di seluruh wilayah Polda NTB ; (giat3143/prog5/SP3/SS3/ IKU3);
 - f) melanjutkan peningkatan pengungkapan terhadap jaringan peredaran gelap Narkoba di wilayah NTB (giat3144/prog5/SP3/SS2/IKU2);
 - g) melanjutkan pengelolaan tahanan yang tidak melanggar HAM dan mengelola inventarisasi barang bukti secara transparan dan akuntabel (giat3084/prog5/SP3/SS2/IKU2);
- 2) melaksanakan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kompetensi; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik Polri Polda NTB; (giat3100/ prog3/SP3/ SS3/IKP2);
 - b) meningkatkan kemampuan pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam pengelolaan TKP; (giat3100/prog3/SP3/SS3/IKP2);
 - c) peningkatan sertifikasi jumlah penyidik Polair Ditpolairud serta Ditlantas Polda NTB; (giat3100/prog3/SP3/SS3/IKP2);
- 3) peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melakukan kerja sama dibidang penyelidikan dan penyidikan; (giat3137/prog5/SP3/SS2/IKU2);
 - b) mengembangkan sistem pengawasan penyidik secara elektronik (e-penyidikan). (giat5086/prog2/SP3/SS2/IKU2);
- 4) mengembangkan pusat data dan informasi kriminal yang terintegrasi (SPP-TI dan e-MP); untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) mengintegrasikan pelayanan dan penyajian data informasi kriminal antar Satker Polda NTB dan aparat penegak hukum; (giat5084/ prog5/SP3/ SS2/IKU2);
 - b) mengintegrasikan sistem data informasi kriminal antar Satker Polda NTB dan aparat penegak hukum; (giat5084/prog5/SP3/SS2/IKU2);

- c) standardisasi data kriminal nasional; (giat5084/prog5/SP3/ SS2/IKU2);
 - d) menangani kekhawatiran penduduk yang keluar di malam hari; (giat5084/prog5/SP3/SS2/IKU2).
- d. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “**Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polri**”, yaitu:
- 1) pembenahan pola Diklat yang siap kerja (vokasi); untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) *upgrading* kurikulum yang meliputi 70% praktik dan 30% teori seluruh pendidikan; (giat5070/prog3/SP4/SS4/IKP5);
 - b) *upgrading* dan sertifikasi Gadik/instruktur; (giat3100/prog3/SP4/SS4/IKP5);
 - c) pelatihan penanganan konflik secara humanis bagi anggota Brimob, Samapta dan Binmas; (giat3100,5076,3130,5087/prog3,4/SP4/ SS1,4/ IKP5);
 - d) peningkatan kapasitas SDM bidang siber Polri, kualitas dan kuantitas SDM bidang digital forensik; (giat 3100, 3151,3141/ prog3,5/SP4/SS2,4/IKP4);
 - e) sertifikasi profesi anggota Polda NTB (giat3100/prog3/SP4/SS3/ IKP5);
 - f) pelatihan Revolusi mental di lingkungan Polda NTB; (giat3100/ prog3/SP4/ SS4/IKP4).
 - 2) tersusunnya program penyiapan kader unggul; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) menyusun manajemen talenta persiapan kader unggul yang dapat berkompetitif; (giat3108/prog3/SP4/SS7/IKP16);
 - b) menyiapkan kader pimpinan Polri yang bersih, dan bebas dari praktik KKN. (giat3108/prog3/SP4/SS7/IKP16);
 - 3) penataan kelembagaan Polri; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) penerapan proses bisnis di pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi; (giat5052/prog1/SP4/SS7/IKP16);
 - b) melaksanakan penyempurnaan peraturan tentang SOTK tingkat Mabes Polri; (giat5052/prog1/SP4/SS7/IKP16);

- c) menyelenggarakan penataan kelembagaan tipe Polres; (giat5052/ prog1/SP4/SS7/IKP13);
 - d) melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan Polres, Polsek dan Polsubsektor; (giat5052/prog1/SP4/SS7/IKP13);
 - e) menyusun kebijakan penataan eselonisasi dan arsitektur kelembagaan. (giat5052/prog1/SP4/SS7/IKP13);
- 4) melaksanakan rekrutmen proaktif dengan prinsip “BETAH” berbasis TI; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) menyelenggarakan penerimaan dan seleksi pegawai negeri pada Polri secara proaktif, bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) serta *clear and clean* dengan menggunakan *Computer Asisted Test (CAT)* ditingkat Polda; (giat3107/prog3/SP4/SS4/IKP4);
 - b) melaksanakan kampanye proaktif sepanjang tahun guna mendapatkan calon anggota Polri yang berkualitas; (giat3107/prog3/ SP4/SS4/IKP4);
 - c) melaksanakan uji kompetensi melalui kegiatan *Assessment Center* dalam seleksi Dikbangum (giat3108/prog3/SP4/SS4/IKP4);
 - d) menyusun bijak Diklat aparatur sesuai dinamika pelaksanaan tugas untuk menciptakan SDM Polri yang Promoter; (giat5068/prog3/ SP4/SS4/IKP5).
- 5) pembinaan karier berbasis meritokrasi dan kompetensi; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) menyelenggarakan seleksi jabatan terbuka (*open bidding*) dalam pembinaan karier personel secara *merryt system* melalui Asesmen Center; (giat3108/prog3/SP4/SS4/IKP4);
 - b) sertifikasi terhadap personel Polri sesuai dengan fungsi kepolisian; (giat3100/prog3/SP4/SS4/IKP4);
 - c) peningkatan kemampuan kedokteran dan kesehatan serta keterampilan bagi personel jajaran Dokkes Polri; (giat3072/prog1/ SP4/ SS4/IKP4);

- d) melanjutkan penyusunan regulasi rumpun jabatan fungsional; (giat3108/prog3/SP4/SS4/IKP4);
 - e) melanjutkan *mapping* jabatan fungsional dari tingkat Polda sampai dengan Satker kewilayahan; (giat3108/prog3/SP4/SS4/IKP4);
 - f) menyelenggarakan seleksi jabatan fungsional secara terbuka; (giat3108/prog3/SP4/SS4/IKP4);
 - g) menyelenggarakan klasifikasi dan *mapping* psikologi sebagai dasar spesialisasi. (giat3110/prog3/SP4/SS4/IKP4);
- 6) kajian peningkatan Tunjangan lebih dari 70%; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) meningkatkan nilai AKIP dan nilai RB Polri; (giat5054/prog1/SP4/SS7/IKP13,16);
 - b) meningkatkan penilaian apresiasi BPK tentang Perwabkeu Polri; (giat5060/prog2/SP4/SS7/IKP15);
- 7) peningkatan layanan kesejahteraan, kesehatan personil serta keselamatan kerja bagi aparatur Polri; mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) meningkatkan pelayanan secara proaktif dalam pemberian tanda kehormatan kepada pegawai negeri pada Polri; (giat3105/prog3/SP4/SS4/IKP4);
 - b) melaksanakan latihan keterampilan dan pembekalan ketrampilan khusus bagi personel Polri; (giat3105/prog3/SP4/SS4/IKP4);
 - c) peningkatan standar akreditasi rumah sakit Bhayangkara; (giat5072/ prog1/SP4/SS4/IKP4);
 - d) peningkatan standar akreditasi di Fasilitas Kesehatan oleh Komisi akreditasi Kemenkes; (giat5072/ prog1/SP4/SS4/IKP4).
- e. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Pengembangan Almatsus Kepolisian yang Modern secara Bertahap dan Berkelanjutan”**, yaitu:
- 1) pengusulan pemenuhan kebutuhan minimal Alsuspol sesuai dengan teknologi terkini; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) pengusulan pemenuhan Almatsus Polri yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung penggelaran operasional dalam rangka penanganan PPA, penyelidikan, penginderaan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan lawan insujensi; (giat3084/prog2/SP5/SS5/IKP10);
 - b) melaksanakan pengelolaan tahanan yang tidak melanggar HAM dan Inventarisasi Barang Bukti Secara Transparan dan Akuntabel; (giat3084/prog5/SP5/ SS5/IKP10);
 - c) melanjutkan inventarisasi kondisi riil Alpalkam dan Almatsus Polda NTB; (giat3084/prog2/SP5/ SS5/IKP10);
 - d) melanjutkan pengusulan terhadap rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus Polri (Min dan Maks); (giat3084/prog2/SP5/ SS5/IKP10);
- 2) pemenuhan rumah dinas aparaturnya Polda NTB dan pembangunan fasilitas perkantoran, kesehatan, rumah dinas di wilayah Polda NTB; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan pembangunan rumah dinas, flat dan rusun bagi personel Polri Polda NTB; (giat5062/prog2/SP5/SS5/IKP9);
 - b) melakukan pembangunan rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya yang dekat dengan kediaman/lingkungan Mako; (giat5062/ prog2/SP5/ SS5/IKP9);
 - c) melanjutkan penyusunan Renbut fasilitas perkantoran dan Rumdin di wilayah Polda NTB; (giat5060/prog2/SP5/ SS5/IKP9);
 - d) melaksanakan pembangunan fasilitas perkantoran dan Rumdin di wilayah Polda NTB SS5/IKP9/IKP4);
- 3) menyusun katalogisasi Alsuspol Fungsi; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan pengusulan pengadaan Alpalkam dan Almatsus Polda NTB; (giat3084/ prog2/SP5/SS5/IKP10);
 - b) melaksanakan penyusunan pemetaan katalogisasi Almatsus dan Alpalkam Polda NTB; (giat5060/prog2/SP5/ SS5/IKP10);
- 4) evaluasi dan penyusunan kebutuhan minimal Alpalkam dan Almatsus Polda NTB; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melakukan Anev terhadap pengadaan Alpalkam dan Almatsus Polda NTB; (giat5060/prog2/SP5/SS5/IKP10);
 - b) melakukan Anev terhadap katalogisasi Alpalkam dan Almatsus Polda NTB (giat5060/prog2/SP5/ SS5/IKP10);
- 5) pengembangan *Scientific Crime Investigation (SCI)* di kewilayahan secara bertahap; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) mengusulkan pembangunan laboratorium forensik beserta rumah dinas di Polda dalam rangka mendukung pengungkapan kasus tindak pidana di bidang penegakan hukum; (giat5062/prog2/SP5/ SS5/IKP9);
 - b) melanjutkan penyusunan Renbut fasilitas perkantoran dan Rumdin di wilayah secara selektif prioritas dan berkelanjutan. (giat5060/prog2/SP5/SS5/IKP9);
- 6) pembangunan SPKT tingkat Polres dan Polsek serta pembangunan Satpas sesuai SPM secara *online*; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) menyusun standar pembangunan SPKT sesuai SPM; (giat5060/prog2/SP5/ SS5/IKP9);
 - b) mengoptimalkan Binmas *online* sistem yang berkoneksi dengan *online single submission* dalam penerbitan surat izin operasional BUJP (giat3084/prog2/SP5/SS5/IKP10);
- 7) pengembangan Almatsus *Scientific Crime Investigation (SCI)*; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pengusulan Almatsus siber dalam rangka pengungkapan kasus tindak pidana siber; (giat5062/prog2/SP5/ SS5/IKP10);
 - b) pengusulan peralatan laboratorium forensik dan sidik jari dengan teknologi terkini (giat5062/prog2/SP5/ SS5/IKP10);
- 8) pembangunan Sarpras berbasis TIK terkait kejahatan siber; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pengusulan Almatsus Siber dalam rangka pengungkapan kasus tindak pidana; (giat3084/prog2/SP5/ SS5/IKP10);

- b) pembangunan pada Unit Siber di Kewilayahan. (giat3084,5062/prog2/SP5/SS5/IKP10).
- f. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif dan Terpercaya”**, yaitu:
- 1) penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) monitoring penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu; (giat3091/prog1/SP6/SS9/IKP19);
 - b) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara online; (giat3091/prog1/SP6/SS9/IKP19);
 - c) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas eksternal; (giat3091/prog1/SP6/SS9/IKP19);
 - d) memberikan SP2HP kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir komplain dari masyarakat kepada Polri di bidang penegakan hukum menjunjung tinggi HAM kepada pelapor/ korban dan tersangka; (giat5086/prog5/SP6/SS6/IKP11);
 - e) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan agar berjalan dengan benar (giat5086/prog5/SP6/SS6/IKP11);
 - 2) penguatan Saber pungli; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) pembangunan sistem pencegahan pungutan liar yang pelaksanaannya bekerja sama dengan KPK RI, Kompolnas RI dan Ombudsman RI; (giat3091/prog1/SP6/SS6/IKP11);
 - b) pembangunan sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang pungutan liar dari tingkat kewilayahan sampai dengan Polda; (giat3091/prog1/SP6/SS6/IKP11);
 - c) mengintensifkan Satgas Saber Pungli terhadap Pungli yang membajak program pemerintah; (giat3091/prog1/SP6/SS6/IKP11);
 - 3) pencegahan Korupsi di internal Polda NTB; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melanjutkan sosialisasi Perkap Nomor 8 Tahun 2017 tentang LHKPN, Perkap Nomor 9 Tahun 2017 tentang usaha bagi anggota PolriPolda NTB dan Perkap Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kepemilikan Barang Mewah bagi Anggota Polri dan PNS Polri (giat3091/prog1/SP6/ SS9/IKP19);
 - b) meningkatkan layanan kontak pengaduan masyarakat terkait adanya ketidakpuasan masyarakat atas layanan kepolisian. (giat3088/ prog1/ SP6/ SS9/IKP19);
- 4) pengawasan berbasis TI; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) optimalisasi pengawasan melalui aplikasi e-pengawasan; (giat3091/ prog1/SP6/SS9/IKP19);
 - b) penerapan sistem pengaduan masyarakat secara *online*. (giat3084/ prog1/SP6/SS9/IKP19);
- 5) peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan pendampingan Satker/Satwil atas pemenuhan Indikator Pencapaian Kinerja Polri guna persiapan dilakukan survei kepuasan pengguna terhadap pemenuhan indikator WISPI dan UNPSA; (giat5053/prog1/SP6/SS7/IKP16);
 - b) melaksanakan pengukuran kinerja dengan Indeks Tata Kelola Polri (ITK) berbasis *web* dan *mobile* secara *online* (ITK-O) tingkat Polresta/Polres dan Satker Polda;(giat5053/prog 1/SP6/ SS7/IKP16);
 - c) melaksanakan bimbingan kepada unit penyelenggara pelayanan publik Polda NTB untuk memedomani kebijakan Forum Konsultasi Publik (FKP), sebagai wadah menampung aspirasi dari seluruh masyarakat/*stakeholder* terkait kebijakan penyelenggaraan layanan publik yang diberikan oleh Polda NTB dalam rangka evaluasi kebijakan layanan; (giat5053/prog1/SP6/ SS7/IKP16);
 - d) melanjutkan kegiatan asistensi penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh unit pelayanan publik Polresta/Polres agar sesuai dengan komponen standar pelayanan di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik dalam rangka

perbaikan unit pelayanan publik dan peningkatan indeks pelayanan publik Polri; (giat5053/prog1/SP6/ SS7/IKP16);

7. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI POLRES SUMBAWA BARAT

Guna mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polres Sumbawa Barat Tahun 2021, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. Sasaran prioritas “Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang humanis di wilayah Sumbawa Barat” dengan arah kebijakan:
 - 1) Penguatan peran Polri dalam menjaga keamanan Sumbawa Barat melalui peningkatan kemampuan deteksi aksi, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan: peningkatan kemampuan deteksi aksi (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) fungsi Intelkam Polres Sumbawa Barat yang didukung personel, anggaran dan teknologi Intlijen yang memadai guna mnurunkan dan mengililminasi setiap potensi gangguan keamanan dan gejala social yang terjadi di wilayah hukum Polres Sumbawa Barat, (GIAT3112,3114,3115,3116,3117,3150/ PROG7/SP1/SS1/IKU1/PROM3, pelaksana/penanggung jawab Kasat intelkam Polres Sumbawa Barat);
 - 2) Pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas serta terorisme, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:
 - a) menguatkan program polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu Desa/Kelurahan, (GIAT5076/PROG9/SP1/ SS1/IKU1/PROM8,pelaksana/ penanggung jawab Kasat binmas Polres Sumbawa Barat);
 - b) meningkatkan kemampuan penanganan separatisme, radikalisme dan intoleransi melalui kegiatan preemtif dan preventif, (GIAT5076/ PROG9/SP1/SS1/IKU1/PROM8,11, pelaksana/penanggung jawab Kasat binmas Polres Sumbawa Barat);
 - c) meningkatkan Kemampuan Pencegahan Kejahatan Melalui Penguatan kegiatan fungsi Binmas; (GIAT5076/PROG9/SP1/ SS1/IKU1/PROM8, pelaksana / penanggung jawab Kasat binmas Polres Sumbawa Barat);

- d) pemanfaatan mantan-mantan teroris yang sudah pancasilais untuk membantu menyadarkan masyarakat yang berpaham radikal, (GIAT5076/PROG9/SP1/SS1/IKU1/PROM8, pelaksana/ penanggung jawab Kasat binmas Polres Sumbawa Barat);
 - e) penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media sosial serta kerjasama dengan instansi terkait; (GIAT5076/PROG9/SP1/SS1/IKU1/PROM8, pelaksana/ penanggung jawab Kasat binmas Polres Sumbawa Barat);
 - f) identifikasi Terhadap Individu Atau Kelompok Dan Sosialisasi Terhadap Mantan Narapidana Dengan Keluarganya. (GIAT5076/PROG9/SP1/SS1/IKU1/PROM8, pelaksana/ penanggung jawab Kasat binmas Polres Sumbawa Barat).
 - g) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:
 - a) membangun dan memberdayakan pengamanan Swakarsa, (GIAT5076/PROG9/SP1/SS1/IKU1/PROM8, pelaksana/ penanggung jawab Kasat binmas Polres Sumbawa Barat);
 - b) meningkatkan kemampuan bhabinkamtibmas dalam mendampingi mantan pecandu narkoba yang telah direhabilitasi dengan menggunakan program dana desa, (GIAT5076/PROG9/SP1/SS1/IKU1/PROM8, pelaksana/ penanggung jawab Kasat binmas Polres Sumbawa Barat).
- 3) Mewujudkan Kamseltibcarlantas, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:
- a) melaksanakan Sosialisasi Budaya Tertib Lalu Lintas, GIAT3133/PROG10/SP1/SS1/IKU1/PROM7), pelaksana / penanggung jawab Kasat lintas Polres Sumbawa Barat);
 - b) melaksanakan pembangunan ISDC, (GIAT3133/PROG10/SP1/SS1/IKU2/PROM7, pelaksana/ penanggung jawab Kasat lintas Polres Sumbawa Barat);

- c) melaksanakan pembangunan RTMC, (GIAT3133/PROG10/SP1/ SS1/IKU2/PROM7, pelaksana/penanggungjawab Kasat lantans Polres Sumbawa Barat).
- 4) Penggelaran operasional dan *back up* kewilayahan personel Polri dalam rangka pengamanan Unras, konflik sosial dan menjalin sinergitas polisional, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:
- a) menyiapkan personel Polri yang mampu bergerak secara cepat dalam rangka pengamanan Unras, konflik sosial, (GIAT5052/PROG10 / SP7 / IKU1 / PROM7), pelaksana/penanggung jawab Kasat Sabhara Polres Sumbawa Barat);
- 5) Peningkatan kerjasama Instansi terkait, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:
- a) inventarisasi Mou Polri dengan K/L, Pemda dan *stakeholder* lainnya dalam rangka memperbaharui kerjasama yang habis masa berlakunya, (GIAT3120/PROG8/SP1/SS1/IKU1/PROM7, pelaksana/ penanggungjawab Kabag Ops Polres Sumbawa Barat);
- b) peningkatan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga guna mendukung kerjasama Kepolisian Internasional, (GIAT3122/PROG8/SP1/SS1/IKU1/PROM7, pelaksana / penanggungjawan Kabag Ops Polres Sumbawa Barat);
- c. meningkatkan kerjasama Polri dalam kerangka kerjasama dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban NTB, (GIAT5052/PROG8/ SP1/SS1/IKU1/PROM7, pelaksana/ penanggungjawab Kabag Ops Polres Sumbawa Barat);
- d. meningkatkan diplomasi Kepolisian guna mendukung perwujudan Kamtibmas,(GIAT3122/PROG8/SP1/SS1/IKU1/PROM7, pelaksana/ penanggungjawab Kabag Ops Polres Sumbawa Barat).

- b Sasaran prioritas “Pelayanan Publik Polres Sumbawa Barat yang prima berbasis TIK” dengan arah kebijakan,
- 1) Pengembangan sarana prasarana pelayanan publik yang berbasis TIK, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:
 - a) pembangunan dan pengembangan *System Risk Manajemen* Polri, (GIAT3071,3048/PROG1,2/SP2/SS1/IKU2/PROM2, pelaksanaan/ penanggungjawab Kasubbag Log Polres Sumbawa Barat);
 - b) pembangunan dan pengembangan Command Center dan mobile command center Polri, (GIAT3071,3048/PROG1,2/SP2/SS1/IKU2/PROM2, pelaksanaan/ penanggungjawab Kasubbag Log Polres Sumbawa Barat);
 - a) melakukan inventarisasi kondisi riil sarana prasarana atas pelayanan publik yang berbasis TIK, (GIAT5060/PROG1/SP2/SS1/IKU2/ PROM2, pelaksanaan/ penanggungjawab Kasubbag Log Polres Sumbawa Barat);
 - b) melakukan evaluasi atas sarana prasarana pelayanan publik yang berbasis TIK, (GIAT5060/PROG1/SP2/SS2/IKU3/PROM2, pelaksanaan / penanggungjawab Kasubbag Log Polres Sumbawa Barat).
 - 3) Peningkatan kualitas pelayanan dan sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada layanan publik, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:
 - a) peningkatan pelayanan surat ijin operasional BUJP melalui pelayanan satu pintu di BKPM, (GIAT5076/PROG9/SP2/SS1/IKU2/ PROM8,11, pelaksana/ penanggungjawab Kasat binmas Polres Sumbawa Barat);
 - b) menyusun standar operasional prosedur untuk pelayanan PNBP fungsi Binmas, (GIAT5076 / PROG9 / SP2 / SS1 / IKU2/PROM8,11), pelaksana/ penanggungjawab Kasat binmas Polres Sumbawa Barat);

- c) melaksanakan pelatihan revolusi mental; (GIAT3100/PROG5/SP2/ SS4/IKP1/PROM1), pelaksana/ penanggungjawab Kabag Sumda Polres Sumbawa Barat);
 - d) melaksanakan pembangunan Satpas prototipe; (GIAT3133/ PROG10/SP2/SS1/IKU2/PROM2,11, pelaksana/ penanggungjawab Kasat lintas Polres Sumbawa Barat);
 - e) melaksanakan pembangunan BPKB dan STNK online; (GIAT3133/ PROG10/SP2/SS1/IKU2/PROM2,11, pelaksana/penanggungjawab Kasat lintas Polres Sumbawa Barat).
- 4) Pengelolaan tata ruang SPKT dan RPK yang humanis serta berbasis TIK, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:
- a) meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM sebagai awak SPKT, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), GIAT5062/PROG2/ SP2/SS3/IKU3/PROM2, pelaksana/ penanggungjawab Kasubbag Log Polres Sumbawa Barat);
 - b) mengintegrasikan sarana komunikasi dan pendataan secara online dengan mitra penyedia layanan rujukan dalam rangka penanganan perempuan dan anak (PA) baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana, (GIAT3142/PROG11/SP2/SS3/IKU3/PROM9, pelaksana / penanggungjawab Kasat reskrim Polres Sumbawa Barat);
 - c) mengintegrasikan sarana komunikasi dan pendataan dengan uppa pada jajaran Reskrim Polres dan Polsek sebagai sarana informasi dan komunikasi dalam rangka penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak; (GIAT3142/ PROG11/SP2/SS3/IKU3/PROM9, pelaksanaan/ penanggungjawab Kasat Reskrim Polres Sumbawa Barat);
 - d) membuat media edukasi/sosialisasi secara interaktif mengenai pelayanan perempuan dan anak dengan melibatkan ahli/konsultan, (GIAT 3142 / PROG11 /SP2 / SS3 / IKU3 / PROM9 , pelaksanaan/ penanggung jawab Kasat Reskrim Polres Sumbawa Barat);

- e) melakukan inventarisasi dan evaluasi kondisi tata ruang SPKT dan RPK, (GIAT5060/PROG2/SP2/SS3/IKU3/PROM2), pelaksanaan/ penanggungjawab Kasubbag Log Polres Sumbawa Barat);
 - f) pengembangan SPKT berbasis TIK dengan menggunakan sistem EMP, (GIAT3142/PROG11/SP2/SS3/IKU3/PROM9, pelaksanaan/ penanggungjawab Kasat Reskrim Polres Sumbawa Barat);
- 5) Pengelolaan *quick respons* kepolisian dengan menggunakan standar yang kredibel dan akuntabel , untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:
- meningkatkan jumlah pelayanan prima dalam mencegah tindak kejahatan, (GIAT 5052 / PROG10 / SP7 /SS 1/IKU1/PROM6, pelaksana/penanggung jawab Kasat sabhara Polres Sumbawa Barat).
- c. Sasaran prioritas “Penegakan hukum secara berkeadilan dan terpercaya di wilayah Sumbawa Barat” dengan arah kebijakan:
- 1) Peningkatan profesionalisme dalam penanganan dan penyelesaian Tindak Pidana, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:
 - a) melakukan penyelidikan yang berhubungan dengan hakikat ancaman tindak pidana terorisme, penindakan serta penyidikan tindak pidana terorisme sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, (GIAT3143/PROG11/SP3/SS3/IKU3/PROM9, pelaksanaan/ penanggungjawab Kasat reskrim Polres Sumbawa Barat);
 - b) mengintensifkan pemberantasan 4 jenis kejahatan dengan prioritas tindak pidana Korupsi, Narkoba, Terorisme dan Siber termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kelompok marjinal, (GIAT 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 5083/ PROG11/SP3/SS3/IKU3/PROM9), pelaksana/penanggungjawab Kasat reskrim Polres Sumbawa Barat);
 - c) peningkatan kemampuan pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam pengolahan tempat kejadian perkara (Crime Scene

- Investigation), (GIAT3141 / PROG11 / SP3 / SS3 / IKU3 / PROM9), pelaksanaan/ penanggungjawab Kasat reskrim Polres Sumbawa Barat);
- d) penguatan Sub Satker Sat Reskrim (Tipikor) di tingkat Polda, (GIAT3146 / PROG11/SP3/SS3/IKU3/PROM9, pelaksanaan/ penanggungjawab Kasat reskrim Polres Sumbawa Barat);
- e) pemantauan, pemetaan, dan penangkapan gembong teroris di seluruh wilayah Polres Sumbawa Barat, (GIAT3143/PROG11/SP3/SS3/IKU3/PROM9,pelaksanaan/ penanggungjawab Kasat reskrim Polres Sumbawa Barat);
- f) peningkatan pengungkapan terhadap jaringan peredaran gelap narkoba skala Regional dan Internasional, (GIAT3144/PROG11/ SP3/SS3/IKU3/PROM9,pelaksanaan/penanggungjawab Kasat resnarkoba Polres Sumbawa Barat).
- 2) Peningkatan kompetensi penyidik melalui sertifikasi, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:
- a) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik Polres Sumbawa Barat, (GIAT5052/ PROG1/SP7/SS1/IKU3/PROM6, pelaksana/ penanggungjawab Bag Sumda Polres Sumbawa Barat).
- 3) Peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabel dalam penegakkan hukum yang bebas dari pungli, rekayasa perkara yang berbelit-belit, pemerasan dan makelar kasus, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:
- a) mengusulkan revisi perkap tentang manajemen penyidikan, (GIAT3137 / PROG11 / SP3 / SS3 / IKU3 / PROM9), pelaksana/ penanggungjawab Kasat reskrim Polres Sumbawa Barat);
- b) membangun sistem pengawasan penyidik secara elektronik (e-penyidikan), (GIAT5086 / PROG11 / SP3 / SS3 / IKU3 / PROM9), pelaksana / penanggungjawab Kasat Reskrim Polres Sumbawa Barat).
- 4) Peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal Daerah Sumbawa Barat, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:

- a) mengintegrasikan pelayanan dan penyajian data informasi kriminal antarsatker internal Polres Sumbawa Barat, (GIAT5084/PROG11/SP3/SS3/ IKU3/PROM9, pelaksana/ penanggungjawab Kasat reskrim Polres Sumbawa Barat);
 - b) mengintegrasikan sistem data informasi kriminal antarpenegak hukum, (GIAT5084/PROG11/SP3/SS3/IKU3/PROM9, pelaksana/ penanggungjawab Kasat reskrim Polres Sumbawa Barat);
 - c) memperkuat pusat informasi kriminal yang terintegrasi, (GIAT5084/ PROG11/SP3/SS3/IKU3/PROM9, pelaksana/penanggungjawab Kasat reskrim Polres Sumbawa Barat);
 - d) mempermudah akses informasi terhadap SP2HP, (GIAT5084/ PROG11/SP3/SS3/IKU3/PROM9, pelaksana/penanggungjawab Kasat reskrim Polres Sumbawa Barat);
 - e) peningkatan jumlah sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) berbasis TI di Polres Sumbawa Barat, (GIAT5084/PROG11/SP3/SS3/IKU3/ PROM9, pelaksana/ penanggungjawab Kasat reskrim Polres Sumbawa Barat);
- d. Sasaran prioritas “Profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polri yang sesuai standar” dengan arah kebijakan:
- 1) Peningkatan kualitas 8 standar pendidikan, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:

menyusun standar kompetensi lulusan sesuai jenis dan jenjang pendidikan (Diktuk, Dikbangum, dan Dikbangspes), (GIAT3100/PROG5/SP4/SS4/ IKP1/PROM1, pelaksana/ penanggung jawab Kabag Sumda Polres Sumbawa Barat).
 - 2) Penyusunan ABK, SIK3 dan pengembangan struktur organisasi, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:
 - a) melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis analisa beban kerja dan HTCK pada Satfung Polres Sumbawa Barat, (GIAT5052/PROG1/ SP6/SS7/ IKP11/PROM6, pelaksanaan/ penanggungjawab Kabag Ren Polres Sumbawa Barat);

- b) melaksanakan pengkajian klasifikasi kesatuan kewilayahan berdasarkan beban kerja dan kinerja, (GIAT5052/PROG1/SP6/ SS7/ IKP11/PROM, pelaksanaan/ penanggungjawab Kabag Ren Polres Sumbawa Barat).
- 3) Pelaksanaan rekrutmen, seleksi Dikbangum dan Binkar sesuai kompetensi dan kebutuhan, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:
- a) menyelenggarakan rekrutmen dan seleksi dikbang pegawai negeri pada Polri secara proaktif, bersih, transparan, akuntabel dan humanis (betah) serta clear and clean dengan menggunakan aplikasi secara online, (GIAT3107/PROG6/SP4/SS4/IKP1/PROM1,11), pelaksana/ penanggungjawab Kabag Sumda Polres Sumbawa Barat);
- b) menyelenggarakan seleksi jabatan terbuka (*open bidding*) dalam pembinaan karier personel secara merryt system, (GIAT3107/PROG6/SP4/SS4/IKP1/PROM1), pelaksana/ penanggungjawab Kabag Sumda Polres Sumbawa Barat);
- c) melaksanakan uji kompetensi melalui kegiatan assessment center dalam seleksi dikbangum dan pembinaan karir personel, (GIAT3108/ PROG1/SP7/SS1/IKU3/PROM6), pelaksana/ penanggungjawab Kabag Sumda Polres Sumbawa Barat);
- d) menyusun bijak diklat aparatur sesuai dinamika pelaksanaan tugas untuk menciptakan SDM Polres Sumbawa Barat yang promoter, (GIAT5068/ PROG5/SP4/SS4/IKP1/PROM1), pelaksana/ penanggungjawab Kabag Sumda Polres Sumbawa Barat);
- e) melaksanakan pemenuhan hak-hak personel secara layak dan pelatihan kewirausahaan menjelang purna tugas, (GIAT3105/PROG1/SP7/SS1/IKU3/PROM6), pelaksana/ penanggungjawab Kabag Sumda Polres Sumbawa Barat);
- f) menyelenggarakan klasifikasi dan mapping psikologi sebagai dasar spesialisasi dan kesejahteraan personel, (GIAT3110/PROG1/ SP7/SS1/IKU3/PROM6), pelaksana/ penanggungjawab Kabag Sumda Polres Sumbawa Barat);

- g) pengembangan peralatan assessment center Polres Sumbawa Barat dan pengadaan peralatan e-mapping psikologi, (GIAT3108/PROG1/SP7/SS1/IKU3/PROM6).
- 4) Penyusunan rumpun jabatan fungsional dan sertifikasi profesi, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:
- a) sertifikasi terhadap personel Polri sesuai dengan fungsi Kepolisian, (GIAT3100/PROG5/SP4/SS4/IKP1/PROM1), pelaksana/ penanggung jawab Kabag Sumda Polres Sumbawa Barat);
 - b) menyusun regulasi rumpun jabatan fungsional, (GIAT3108/PROG1/ SP7/SS1/IKU3/PROM6), pelaksana/ penanggungjawab Kabag Sumda Polres Sumbawa Barat);
 - c) melaksanakan mapping jabatan fungsional dari tingkat Polda sampai dengan Satker Kewilayahan, (GIAT3108/PROG1/SP7/SS1/ IKU3/PROM6, pelaksana/ penanggungjawab Kabag Sumda Polres Sumbawa Barat);
 - d) menyelenggarakan seleksi jabatan fungsional secara terbuka, (GIAT3108/PROG1/SP7/SS1/IKU3/PROM6, pelaksana/penanggung jawab Kabag Sumda Polres Sumbawa Barat).
- 5) Meningkatkan pelaksanaan *e-government* melalui *e plaining*, *e budgeting* dan *e procurement* , untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:
- a) pengembangan aplikasi SMAP, (GIAT5054/PROG1/SP4/SS7/IKP12 / PROM6), pelaksana/ penanggungjawab Bag Ren Polres Sumbawa Barat);
 - b) pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement*, (GIAT5060 / PROG2 / SP4 / SS7 / IKP12 / PROM6), pelaksana/ penanggung jawab Subbag Logistik Polres Sumbawa Barat);
 - c) penyusunan blueprint teknologi informasi (Assessment, Inventarisasi dan Standarisasi), (GIAT5060/PROG2/SP4/SS7/IKP12/PROM6), pelaksana/ penanggungjawab Subbag Logistik Polres Sumbawa Barat).

- 6) Pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja *online*, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:
- a) melaksanakan update data sipp sebagai dasar pengisian SMK online, (GIAT3108 /PROG1 /SP7 /SS1 /IKU3 / PROM6), pelaksana/ penanggung jawab Bag Sumda Polres Sumbawa Barat);
 - b) meningkatkan prosentase pengisian SMK online sebagai dasar seleksi Dikbang dan pembinaan karir personel, (GIAT3108/PROG1/SP7/SS1/IKU3/PROM6, pelaksana/ penanggung jawab Bag Sumda Polres Sumbawa Barat);
 - c) pengembangan peralatan sipp untuk mendukung terlaksananya pengisian SMK online, (GIAT3108/PROG1/SP7/SS1/IKU3/PROM6, pelaksana/ penanggung jawab Bag Sumda Polres Sumbawa Barat).
- e. Sasaran prioritas “Moderisasi teknologi Alpalkam dan Almatsus Polri secara bertahap dari tingkat Polres sampai dengan Polsek” dengan arah kebijakan:
- 1) Pemenuhan kebutuhan minimal Alpalkam dan Almatsus Polri yang modern, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:
 - a) pemenuhan almatsus modern berbasis teknologi informasi guna mendukung penggelaran opsional Sat Sabhara Polres Sumbawa Barat dalam rangka pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan lawan insujensi, (GIAT3084/PROG2/SP5/SS5/IKP4/PROM4, pelaksana/ penanggung jawab Subbag Log Polres Sumbawa Barat);
 - b) pemenuhan almatsus Lidik Sidik yang berbasis teknologi dan komunikasi yang modern dalam rangka mendukung pengungkapan kasus tindak pidana tingkat Polres Sumbawa Barat sampai dengan kewilayahan, (GIAT3084/PROG2/SP5/SS5/IKP4/PROM4, pelaksana/penanggung jawab Subbag Log Polres Sumbawa Barat);

- c) mengintegrasikan sarana komunikasi dan pendataan secara online dengan mitra penyedia layanan rujukan dalam rangka Penanganan Perempuan dan Anak (PA) baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana, (GIAT3084 / PROG2 / SP5 / SS5 / IKP4 / PROM4), pelaksana / penanggungjawab Subbag Log Polres Sumbawa Barat);
- d) mengintegrasikan sarana komunikasi dan pendataan dengan UPPA pada serse Polres jajaran dan Polsek sebagai sarana informasi dan komunikasi dalam rangka penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, (GIAT3084/PROG2/ SP5/SS5/IKP4/PROM4, pelaksana/ penanggungjawab Subbag Log Polres Sumbawa Barat);
- e) mewujudkan pengelolaan tahanan yang tidak melanggar HAM dan inventarisasi barang bukti secara transparan dan akuntabel, (GIAT3084/PROG2/SP5/SS5/IKP4/PROM4, pelaksana/ penanggung jawab Subbag Log Polres Sumbawa Barat);
- f) melakukan inventarisasi kondisi riil Alpalkam dan Almatsus Polri, (GIAT3084/PROG2/SP5/SS5/IKP4/PROM4, pelaksana/ penanggung jawab Subbag Log Polres Sumbawa Barat);
- g) melakukan pemetaan terhadap rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus Polri (Minimal dan Maksimal), (GIAT3084/PROG2/ SP5/SS5/IKP4/PROM4, pelaksana/ penanggungjawab Subbag Log Polres Sumbawa Barat);
- h) pembuatan protot ype peralatan Polri berbasis teknologi dan inovasi teknologi Kepolisian, (GIAT3084/PROG2/SP5/SS5/IKP4/PROM4, pelaksana/ penanggungjawab Subbag Log Polres Sumbawa Barat);
- i) sertifikasi dan standarisasi alpalkam dan almatsus Polri, (GIAT3084/PROG2/SP5/SS5/IKP4/PROM4, pelaksana/ penanggung jawab Subbag Log Polres Sumbawa Barat);
- j) pengadaan Alpalkam dan Almatsus Polri, dengan menyesuaikan perkembangan teknologi dan tantangan tugas Polri dimasa mendatang, (GIAT3084/PROG2/SP5/SS5/IKP4/PROM, pelaksana/ penanggungjawab Subbag Log Polres Sumbawa Barat).

- 2) Pengusulan pemenuhan Rumdin aparatur Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran dan Rumdin di wilayah Polres Sumbawa Barat;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:
- a) bekerjasama dengan BUMNIS dan industri swasta (ISN) dalam pembuatan protot type, berikut melakukan standarisasi dan sertifikasi Alpalkam dan Almatsus Polri, (GIAT3084/PROG2/SP5/SS5/IKP4/ PROM4, pelaksanaan/ penanggung jawab Subbag Log Polres Sumbawa Barat);
 - b) Menentukan TKDN dalam setiap pelaksanaan pengadaan Alpalkam dan Almatsus Polri, (GIAT3084/PROG2/SP5/SS5/IKP4/PROM4, pelaksanaan/ penanggung jawab Subbag Log Polres Sumbawa Barat);
 - c) inventarisasi Alpalkam dan Almatsus Polri yang dapat dilaksanakan oleh Bumnis dan ISN, (GIAT3084/PROG2/SP5/SS5/IKP4/PROM4, pelaksanaan/ penanggung jawab Subbag Log Polres Sumbawa Barat);
 - d) melaksanakan pengadaan Alpalkam dan Almatsus Polri oleh BUMNIS atau ISN, (GIAT3084/PROG2/SP5/SS5/IKP4/PROM4, pelaksanaan/ penanggung jawab Subbag Log Polres Sumbawa Barat).
- 3) Evaluasi dan penyusunan kebutuhan minimal Alpalkam dan Almatsus Polri, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:
- a) melakukan inventarisasi kondisi riil atas fasilitas perkantoran, (GIAT5062/PROG2/SP5/SS5/IKP4/PROM4, pelaksana/ penanggung jawab Subbag Log Polres Sumbawa Barat);
 - b) menyusun renbut fasilitas perkantoran, (GIAT5062/PROG2/SP5/SS5/IKP4/PROM4, pelaksana/ penanggung jawab Subbag Log Polres Sumbawa Barat);
 - c) menyusun renbut fasilitas perkantoran secara selektif prioritas dan berkelanjutan, (GIAT5062 / PROG2 / SP5 / SS5 / IKP4 / PROM4), pelaksana / penanggung jawab Subbag Log Polres Sumbawa Barat),

- 4) Pengembangan Labfor diwilayah Polres Sumbawa Barat secara bertahap, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:
- a) melakukan inventarisasi kondisi riil Alpalkam dan Almatsus Polri, (GIAT3084/PROG2/SP5/SS5/IKP4/PROM4, pelaksana/ penanggung jawab Subbag Log Polres Sumbawa Barat);
 - b) melakukan anev terhadap pengadaan Alpalkam dan Almatsus Polri, (GIAT3084/PROG2/SP5/SS5/IKP4/PROM4, pelaksana/ penanggung jawab Subbag Log Polres Sumbawa Barat);
 - c) melakukan anev terhadap katalogisasi Alpalkam dan Almatsus Polri, (GIAT3084/PROG2/SP5/SS5/IKP4/PROM4, pelaksana/ penanggung jawab Subbag Log Polres Sumbawa Barat
 - d) susun kebutuhan minimal Alpalkam dan Almatsus Polri, (GIAT3084/PROG2/SP5/SS5/IKP4/PROM4, pelaksana/ penanggung jawab Subbag Log Polres Sumbawa Barat).
- 5) Pengembangan Almatsus SCI, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:
meningkatkan sarana prasarana Lidik Sidik serta Bantek yang memenuhi standar investigasi Tindak Pidana secara ilmiah (*Scientific Crime Investigation-SCI*), (GIAT3084/PROG2/SP5/SS5/IKP4/PROM4, pelaksana/ penanggung jawab Subbag Log Polres Sumbawa Barat).
- 6) Modernisasi Sarpras Binmas, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:
- a) menyusun standar pembangunan Pos Kamling modern, (GIAT5062/PROG2/SP5/SS5/IKP4/PROM4, pelaksana/ penanggung jawab Subbag Log Polres Sumbawa Barat);
 - b) mengoptimalkan penggunaan Binmas online sistem yang berkoneksi dengan online *single submission* dalam penerbitan Surat Ijin Operasional BUJP, (GIAT3084/PROG2/SP5/SS5/IKP4/PROM4, pelaksana/ penanggung jawab Subbag log Polres Sumbawa Barat).

- 7) Pembangunan Sarpras berbasis TIK terkait kejahatan Siber, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:
- a) pengembangan alamsus siber dalam rangka pengungkapan kasus Tindak Pidana, (GIAT5062 / PROG2 / SP5 / SS5 / IKP4 / PROM4), pelaksana / penanggung jawab Rolog Polda NTB);
 - b) pembangunan *cyber digital* Lab pada Unit Siber di Polres Sumbawa Barat, (GIAT5062/PROG2/SP5/SS5/IKP4/PROM4, pelaksana/ penanggung jawab Subbag Log Polres Sumbawa Barat).
- f. Sasaran Prioritas “Regulasi dan sistem pengawasan yang efektif dan terpercaya” dengan arah kebijakan:
- 1) Penanganan publik komplin secara efektif dan terpercaya, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:
 - a) monitoring penanganan pengaduan masyarakat, (GIAT3091/PROG3/SP6/SS9/IKP13/PROM10), pelaksana/ penanggungjawab Siwas Polres Sumbawa Barat);
 - b) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara online, (GIAT3091/PROG3/SP6/SS9/IKP13/PROM10), pelaksana/ penanggungjawab Siwas Polres Sumbawa Barat;
 - c) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas eksternal, (GIAT3091/PROG3/SP6/SS9/IKP13/PROM10), pelaksana/ penanggungjawab Siwas Polres Sumbawa Barat;
 - d) memberikan SP2HP kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimlaisir komplin dari masyarakat kepada polri di bidang penegakan hukum menjunjung tinggi ham kepada pelapor/korban dan tersangka, (GIAT3091/PROG3/SP6/SS9/IKP13/PROM10), pelaksana/ penanggungjawab Siwas Polres Sumbawa Barat;
 - e) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan agar berjalan dengan benar, (GIAT3091/PROG3/SP6/SS9/IKP13/PROM10), pelaksana/ penanggungjawab Siwas Polres Sumbawa Barat).

- 2) Penguatan Siber, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:
 - a) pembangunan sistem pencegahan pungutan liar yang pelaksanaannya bekerjasama dengan KPK RI, Kompolnas RI Dan ombudsman RI, (GIAT3091/PROG3/SP6/SS9/IKP13/PROM10,11, pelaksana / penanggungjawab Siwas Polres Sumbawa Barat);
 - b) pembangunan sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang pungutan liar dari tingkat polda sampai dengan Kewilayahan, (GIAT3091/PROG3/SP6/SS9/IKP13/PROM 10, 11, pelaksana / penanggungjawab Siwas Polres Sumbawa Barat);
 - c) mengintensifkan Satgas Saber Pungli terhadap pungli yang membajak program Pemerintah, (GIAT3091/PROG3/SP6/SS9/IKP13/PROM10,11, pelaksana / penanggungjawab Siwas Polres Sumbawa Barat).

- 3) Pencegahan korupsi di internal Polri, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:
 - a) pelaksanaan sosialisasi Perkap Nomor 8 Tahun 2017 tentang LHKPN, Perkap Nomor 9 Tahun 2017 tentang Usaha Bagi Anggota Polri dan Perkap Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kepemilikan Barang Mewah Bagi Anggota Polri dan PNS Polri, (GIAT3088/ PROG3/SP7/SS1/IKU3/PROM6,11), pelaksana/ penanggung jawab Siwas Polres Sumbawa Barat);
 - b) peningkatan layanan kontak pengaduan masyarakat terkait adanya ketidakpuasan masyarakat atas layanan kepolisian, (GIAT3088/ PROG3/SP7/SS1/IKU3/PROM6,11, pelaksana/ penanggung jawab Siwas Polres Sumbawa Barat).

- 4) Penyempurnaan sistem kelembagaan dan tata laksana Polri yang efektif dan efisien, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:
 - a) pengkajian pembentukan dan perubahan tipe kesatuan kewilayahan, (GIAT5052 / PROG1 / SP6 / SS7 / IKP11 /PROM6),

- pelaksanaan/ penanggung jawab Bag Ren Polres Sumbawa Barat);
- b) penataan daerah hukum kesatuan kewilayahan, (GIAT5052/ PROG1/SP6/SS7/IKP11/PROM6, pelaksanaan/ penanggung jawab Bag Ren Polres Sumbawa Barat);
 - c) penguatan organisasi tingkat polda dan kewilayahan, (GIAT5052/ PROG1/SP6/SS7/IKP11/PROM6, pelaksanaan/ penanggung jawab Bag Ren Siwas Polres Sumbawa Barat).
- 5) Peningkatan pelaksanaan RBP di lingkungan Polri, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:
- a) finalisasi Road Map RBP gelombang IV tahun 2020-2024, (GIAT5053/ PROG1 / SP6 / SS7 / IKP11 / PROM6), pelaksanaan/ penanggung jawab Bag Ren Polres Sumbawa Barat);
 - b) penilaian zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), (GIAT5053/ PROG1/SP6/SS7/IKP11/PROM6, pelaksanaan/ penanggung jawab Bag Ren Polres Sumbawa Barat);
 - c) pengukuran kinerja Polri dengan Indeks Tata Kelola Polri, (GIAT5053/PROG1/SP6/SS7/IKP11/PROM6) pelaksanaan/ penanggung jawab Bag Ren Polres Sumbawa Barat);
 - d) sosialisasi kebijakan Forum Komunikasi Publik, (GIAT5053/ PROG1/SP6/SS7/IKP11/PROM6, pelaksanaan/ penanggung jawab Bag Ren Polres Sumbawa Barat);
 - e) asistensi dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik, (GIAT5053/ PROG1/SP6/SS7/IKP11/PROM6, pelaksanaan/ penanggung jawab Bag Ren Polres Sumbawa Barat);
 - f) sosialisasi kompetisi inovasi pelayanan publik; (GIAT5053/ G3) penanggung jawab Bag Ren Polres Sumbawa Barat;
 - g) PROG1/SP6/SS7/IKP11/PROM6, pelaksanaan/ penanggung jawab Bag Ren Polres Sumbawa Barat).

8. Program Prioritas Kapolri dan Kegiatan Prioritas Polri Di Polres Sumbawa Barat

a. Pelaksanaan Program Prioritas Kapolri

Transformasi menuju Polri yang PRESISI (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi berkeadilan);

Prediktif yaitu pemolisian prediktif atau *Policing* mengedepankan kemampuan memprediksi situasi dan kondisi yang menjadi isu dan permasalahan serta potensi gangguan Kamtibmas, seperti kita ketahui bersama bahwa model pemolisian sebelumnya yaitu : *Standad Model Of Policing, Community of Policing, Disorder Policing, Ploblem Ariennted Policing, Hotspot Policing* dan kita sekarang akan menerapkan Model *Predictive Policing*;

Responsibilitas yaitu rasa tanggungjawab yang diwajibkan dalam ucapan, sikap, perilaku dan responsive dala bentuk pelaksanaan tugas, yang secara keseluruhan ditujukan untuk mejamin kepentingan dan harapan masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban;

Transparansi berkeadilan yaitu realisasi dari prinsip, cara berpikir dan sistem terbuka, akuntabel, humanis dan muah untuk diawasi.

Transformasi menuju Polri yang Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan (PRESISI), dilaksanakan pada 4 (empat) bidang, yaitu transformasi organisasi, transformasi operasional, transformasi pelayanan publik, dan transformasi pengawasan. Keempat transformasi tersebut terdiri dari 16 program dan 51 kegiatan sebagai berikut:

- 1) Transformasi Organisasi diuraikan ke dalam 4 (empat) program yaitu:
 - a) Program Penataan kelembagaan diwujudkan dengan kegiatan:
 - (1) Penguatan Polsek dan Polres sebagai Lini terdepan pelayanan Polri;
 - (2) Penguatan Struktur Organisasi Polri.
 - b) Program Perubahan Sistem dan Metode Organisasi diwujudkan dengan kegiatan:
 - Penyempurnaan pedoman dan SOP Kepolisian yang Presisi berbasis Data dan Teknologi Informasi.
 - c) Program Menjadikan SDM Polri yang unggul di Era Police 4.0 diwujudkan dengan kegiatan:
 - (1) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Polri;
 - (2) Peningkatan system manajemen karier berbasis kinerja;;
 - (3) Perluasan kerjasama Pendidikan di dalam dan luar negeri;
 - (4) Pengelolaan SDM yang humanis;
 - (5) Peningkatan kerjasama pegawai Polri.
 - d) Program Perubahan Teknologi Kepolisian Modern di Era Police 4.0 diwujudkan dengan kegiatan:
 - (1) Penyatuan sistem informasi Kepolisian yang terintegritas;
 - (2) Pemenuhan Sarana dan Prasarana Polri;
 - (3) Kerjasama dengan stakeholdeMenjadikan Puslitbang Polri sebagai pusat riset teknologi.
- 2) Transformasi Operasional diuraikan ke dalam 6 (enam) program yaitu:

- a) Program Pemantapan kinerja pemeliharaan Kamtibmas diwujudkan dengan kegiatan:
- (1) Harkamtibmas dengan pemolisian prediktif;
 - (2) Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam *Society 5.0*;
 - (3) Penguatan Bhabinkamtibmas dgn "*Personal Smart Tools*";
 - (4) Harkamtibmas dengan pengarusutamaan moderasi Beragama dalam memperkokoh NKRI
 - (5) Harkamtibmas dari Bahaya Terorisme;
 - (6) Harkamtibmas dari Gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB);
 - (7) Menjamin keamanan agenda Nasional dan Internasional yang dilaksanakan di Indonesia;
 - (8) Peningkatan sinergisitas dan kolaborasi dengan TNI;
 - (9) Peningkatan sinergisitas dan kolaborasi antar lembaga;
 - (10) Peningkatan Peran Pam Swakarsa;
 - (11) Pengembangan Kerma Internasional.
- b) Program Peningkatan kinerja penegakan hukum diwujudkan dengan kegiatan:
- (1) Proses penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat;
 - (2) Pengembangan Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas)
- c) Program pemantapan dukungan Polri dalam penanganan Covid-19 (PC) diwujudkan dengan kegiatan:
- 1) Meningkatkan Kepolisian dalam Penanganan Covid-19
 - 2) Memperkuat Peran Polri dalam Satgas Covid-19.
- d) Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diwujudkan dengan kegiatan
- (1) Daya dukung Polri terhadap upaya mengembalikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemampuan daya belimasyarakat;
 - (2) Menjaga stabilitas Kamtibmas sebagai dampak terjadinya Covid-19.
- e) Program menjamin keamanan Program Prioritas Nasional diwujudkan dengan kegiatan antara lain:
- (1) Mempersiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia Polri yang dapat mendukung Program Prioritas Nasional;
 - (2) Melaksanakan pengamanan Program Prioritas Nasional;
 - (3) Melakukan evaluasi sistem pengamanan yang dapat menjamin Program Prioritas Nasional;
 - (4) Penanganan bencana alam.
- f) Program penguatan penanganan konflik sosial diwujudkan dengan kegiatan:
- (1) Penanganan konflik perebutan sumber daya (ekonomi);
 - (2) Penanganan konflik unsur SARA, sosial, budaya dan ideologi;
 - (3) Penanganan konflik perebutan pengaruh (politik);
 - (4) Penanganan konflik berlatar belakang lainnya.

- 3) Transformasi Pelayanan Publik diuraikan ke dalam 3 (tiga) program yaitu:
- a) Program Peningkatan kualitas pelayanan publik diwujudkan dengan kegiatan:
 - (1) Modernisasi fasilitas sarana dan prasarana sentra pelayanan publik;
 - (2) Penguatan standarisasi sistem manajemen mutu dan kontrol di semua sentra pelayanan publik Polri;
 - (3) Peningkatan status Daerah Bebas Korupsi (WBK) dan Daerah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada seluruh sentra pelayanan publik;
 - (4) Pembuatan pelayanan online dan delivery service system layanan kepolisian.
 - b) Program Mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegritas diwujudkan dengan kegiatan;
 - (1) Peningkatan pelayanan publik yang terintegrasi berbasis Big Data;
 - (2) Peningkatan integrasi teknologi dan komunikasi dengan media untuk akses layanan, informasi, pengaduan, dan partisipasi masyarakat.
 - c) Program Pemantapan komunikasi publik diwujudkan dengan kegiatan;
 - (1) Penguatan sistem komunikasi publik;
 - (2) Layanan hubungan media;
 - (3) Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
 - (4) Kemitraan dengan berbagai pihak.
- 4) Transformasi Pengawasan dijabarkan ke dalam 3 (tiga) program, yaitu
- a) Program Pengawasan pimpinan terhadap setiap kegiatan diwujudkan dengan kegiatan;
 - Penguatan peran pimpinan.
 - b) Program Penguatan fungsi pengawasan diwujudkan dengan kegiatan;
 - (1) sistem pengawasan internal;
 - (2) sistem pengawasan eksternal;
 - (3) sistem pengaduan online terintegrasi dengan fungsi pengawasan lainnya.
 - c) Program Pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan (*Public Complant*) diwujudkan dengan kegiatan
 - Pembentukan sistem pengawasan oleh masyarakat yang cepat dan mudah.

b. Kegiatan Prioritas Polri Tahun 2021-2024.

Sejalan dengan Rencana Jangka Pendek Nasional (RJPN) dan Rencana Kerja Polri T.A. 2021, sebutan kegiatan "Quick Wins" dirubah menjadi "Kegiatan Prioritas Polri" berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/7681/IX/2020 tanggal 3 September 2020 tentang penetapan struktur Tim pelaksana Kegiatan Prioritas Polri T.A. 2021-2024.

- 1) Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Polri pada tingkat Mabes dilaksanakan 10 kegiatan yaitu:
- a) Penanganan pengaduan masyarakat terhadap personel Polri;
Sasaran: Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri.
 - b) penanggulangan terorisme/radikalisme dan intoleransi;
Sasaran: Terlaksananya identifikasi dan sosialisasi terhadap kelompok terorisme.
 - c) Penanganan tindak pidana perdagangan orang serta kejahatan orang serta kejahatan terhadap perempuan an anak, kelompok rentan;
Sasaran: Menurunnya kasus TTPO, kejahatan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya.
 - d) Perburuan dan penangkapan bandar narkoba dan Jejaringannya
Sasaran: Tertangkapnya bandar narkoba beserta Jejaringannya.
 - e) Penanganan Tindak Pidana Siber
Sasaran: meningkatnya penyelesaian kasus Tindak Pidana Siber
 - f) Pelatihan SDM Polri yang unggul dan Berintegritas
Sasaran: Terwujudnya kemampuan personel Brimob, Sabhara, Binmas dalam penanganan konflik yang humanis.
 - g) Pengamanan Daerah Perbatasan dan pulau Terluar
Sasaran: Terciptanya eamanan di daerah perbatasan laut dan pulau terluar berpenghuni.
 - h) Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Di Daerah Perairan Indonesia
Sasaran: Kepastian hukum dalam penanganan kasus Tindak Pidana di Daerah Perairan.
 - i) Penanganan Obyek Vital dan target Retan Yang Mendapat Pengamanan
Sasaran: Terwujudnya pengamanan pada onjek Vital dan target rentan.
 - j) Perburuan dan Penangkapan Gembong Terorisme Ali Kalora dan Jejaringan Terorisme lainnya
Sasaran: Tertangkapnya gembong terorisne Ali Kalora dan jejaring terorisme lainnya.
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Polri pada tingkat Polda dilaksanakan 5 kegiatan Prioritas Polri sebagai berikut:
- a) Penanganan pengaduan masyarakat terhadap personel Polri;
Sasaran: Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri.
- Rencana aksi:
- (1) terselesaikannya tindaklanjut pengaduan masyarakat di lingkungan Polri;
 - (2) Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dengan Sاتفung pengawas internal Polri;

(3) Tersedianya data akurat penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Polri.

- b) Penanggulangan terorisme/radikalisme dan intoleransi;
 Sasaran: Terlaksananya identifikasi dan sosialisasi terhadap kelompok terorisme.

Rencana Aksi:

- (1) Terlaksananya identifikasi terhadap kelompok Terorisme/radikalisme dan intoleransi;
- (2) Terlaksananya penanggulangan/sosialisasi terhadap kelompok terorisme/radikalisme dan intoleransi.

- c) Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang serta kejahatan orang serta kejahatan terhadap perempuan dan anak, kelompok rentan;

Sasaran: Menurunnya kasus TTPO, kejahatan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya.

Rencana Aksi:

- (1) terselesaikannya tindak lanjut penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang serta kejahatan terhadap perempuan dan anak, kelompok rentan;
- (2) Koordinasi dengan staf pendukung internal Polri.

- d) Pelatihan SDM Polri yang unggul dan berintegritas

Sasaran: Terwujudnya kemampuan personel Brimob, Samapta, Binmas dalam penanganan konflik yang humanis

Rencana Aksi:

- (1) Bahan ajar;
- (2) SOP mata pelajaran lapangan;
- (3) SOP Pola Pengasuhan;
- (4) tenaga pendidik sesuai dengan kompetensi mata pelajaran yang di emban;
- (5) mata pelajaran yang telah dilaksanakan;
- (6) ujian setiap mata pelajaran yang dilaksanakan;
- (7) seluruh komponen yang berkaitan dengan pelayanan proses Pendidikan dan pelatihan SPN Polda NTB.

- e) Penanganan obyek vital dan target rentan yang mendapat pengamanan

Sasaran: Terwujudnya pengamanan pada objek vital dan target rentan.

Rencana Aksi:

- (1) Jumlah obyek vital yang mendapat pengamanan;
- (2) Jumlah target Rentan yang mendapat pengamanan.

BAB V**PROGRAM/KEGIATAN, PAGU REFORCUSSING TAHAP III TAHUN 2021
DAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN HIBAH T.A. 2021 POLRES SBW BRT****9. PROGRAM DAN KEGIATAN POLRES SUMBAWA BARAT**

Rencana Kerja Polres Sumbawa Barat Tahun 2021 berdasarkan Refocussing Tahap III sebagai berikut:sebagai berikut :

a. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana**1) Tujuan:**

Menanggulangi dan Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban melalui penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel serta menjunjung tinggi hak asasi manusia;

2) Kegiatan:

(a) Penindakan Tindak Pidana Laka Lantas 59 Kasus;

(b) Penindakan Tindak Pidana Umum 214 Jumlah Penanganan TP;

(c) Penindakan Tindak Pidana Narkoba 12 Jumlah Penanganan TP;

(d) Penindakan Tindak Pidana Korupsi 4 Jumlah Penanganan TP:

(e) Pembinaan operasional penyelidikan dan penyidikan TP 10 jumlah bantuan;

(f) Pengawasan penyidikan 6 jumlah pengawasan.

b. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri**1) Tujuan:**

Terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan modernisasi Almatsus dan sarana prasarana Polri guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi bidang pembinaan dan operasional.

2) Kegiatan:

a) Dukungan manajemen dan teknik Sarpras 1 Layanan;

c. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**1) Tujuan:**

Terpeliharanya Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional dan informasi kepolisian serta kerja sama lintas sektoral yang focus pada pelaksanaan tugas fungsi deteksi aksi, preemtif dan preventif.

- 2) Kegiatan:
 - (a) Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban 1 Layanan;
 - (b) Analisis Keamanan 160 Dokumen;
 - (c) Penyelenggaraan Strategis Kamtib Bidang Politik 655 jumlah laporan kegiatan;
 - (d) Penyelenggaraan Strategis Kamtib Bidang Ekonomi 479 jumlah laporan kegiatan;
 - (e) Penyelenggaraan Strategis Kamtib Bidang Sosbud 559 jumlah laporan kegiatan;
 - (f) Penyelenggaraan Strategis Kamtib Bidang Kamneg 729 jumlah laporan kegiatan;
 - (g) Pembinaan pelayanan fungsi Sabhara 365 giat;
 - (h) Pembinaan Pam Obyek Vital 365 giat;
 - (i) Peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas 12.967 giat;
 - (j) Pembinaan Potkam 1.364 giat;
 - (k) Pengendalian Operasi Kepolisian 5 Giat;

d. Program Dukungan Manajemen

- 1) Tujuan:

Terwujudnya *good governance* dan *clean government* melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas; pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian; sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran dan integrasi serta kerja sama lintas sektor.
- 2) Kegiatan:
 - a) Penerangan masyarakat 1 layanan;
 - b) Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri 1 Layanan;
 - c) Pertanggungjawaban profesi 14 laporan;
 - d) Penyelenggaraan pengamanan Internal Polri 7 laporan;
 - e) Penegakan Tata Tertib dan Disiplin Polri 7 laporan;
 - f) Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan 4 laporan;
 - g) Penyusunan dan penyuluhan Hukum 5 dokumen;

h) Manajemen anggaran 10
Naskah/laporan;

10. ANGGARAN REFORCUSSING POLRES SUMBAWA BARAT T.A. 2021

Berdasarkan Pagu Indikatifl Polres Sumbawa Barat T.A. 2021 anggaran 4 (empat) program sebesar **Rp 42.642.119.000,-** salah satunya bersumber dari 313.160.000 (Hibah Dalam Negeri) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dengan anggaran Rp. 1.907.186.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Penindakan Tindak Pidana Laka Lantas dengan anggaran sebesar Rp. 54.656.000,- (PNBP);
 - 2) Penindakan Tindak Pidana Umum dengan anggaran sebesar Rp. 1.089.442.000,- (Rupiah Murni);
 - 3) Penindakan Tindak Pidana Narkoba dengan anggaran sebesar Rp. 479.487.000,- (Rupiah Murni);
 - 4) Penindakan Tindak Pidana Korupsi dengan anggaran sebesar Rp 269.636.000,- (Rupiah Murni);
 - 4) Pembinaan Operasional Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dengan anggaran sebesar Rp. 5.640.000,- (Rupiah Murni);
 - 5) Pengawasan Penyidikan dengan anggaran sebesar Rp 8.325.000,- (Rupiah Murni).

- b. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri dengan anggaran Rp 3.202.011.000,- dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras dengan anggaran sebesar Rp. 3.202.011.000,- (PNBP dan Rupiah Murni).

- c. Program Pemeliharaan Kamtibmas dengan anggaran Rp. 7.869.204.000,- dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dukungan Manajemen Pemeliharaan Kamtibmas dengan anggaran sebesar Rp. 2.264.120.000,- (PNBP dan Rupiah Murni);
 - 2) Analisis Keamanan dengan anggaran sebesar Rp. 158.969.000,- (Rupiah Murni);
 - 3) Penyelenggaraan Strategi Kamtib Bidang Ekonomi dengan anggaran sebesar Rp. 201.054.000,- (PNBP dan Rupiah Murni);

- 4) Penyelenggaraan Strategi Kamtib Bidang Sosial Budaya dengan anggaran sebesar Rp. 231.093.000,- (PNBP dan Rupiah Murni);
 - 5) Penyelenggaraan Strategi Kamtib Bidang Keamanan Negara dengan anggaran sebesar Rp. 508.170.000,- (PNBP dan Rupiah Murni);
 - 6) Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara dengan anggaran sebesar Rp. 712.212.000,- (PNBP);
 - 7) Penyelenggaraan Pengamanan Obyek Vital dengan anggaran sebesar Rp. 179.989.000,- (PNBP);
 - 8) Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas dengan anggaran sebesar Rp. 782.119.000,- (PNBP);
 - 9) Pembinaan Potensi Keamanan dengan anggaran sebesar Rp. 1.819.933.000,- (PNBP dan Rupiah Murni);
 - 10) Pengendalian Operasi Kepolisian dengan anggaran sebesar Rp. 782.628.000,- (Rupiah Murni).
- d. Program Dukungan Manajemen dengan anggaran sebesar Rp. 29.469.132.000,-
- 1) Penerangan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 66.963.000 bersumber dari rupiah murni;
 - 2) Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri dengan anggaran sebesar Rp. 29.469.132.000,- (Rupiah Murni);
 - 3) Pertanggungjawaban Profesi dengan anggaran sebesar Rp. 14.190.000,- (Rupiah Murni);
 - 4) Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri dengan anggaran sebesar Rp. 6.512.000,- (Rupiah Murni);
 - 5) Penegakan Tata Tertib dan Disiplin Polri dengan anggaran sebesar Rp. 13.000.000,- (Rupiah Murni);
 - 6) Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp. 18.221.000,- (Rupiah Murni);
 - 7) Penyusunan dan Penyuluhan Hukum dengan anggaran sebesar Rp. 27.200.000,- (Rupiah Murni);
 - 8) Manajemen Anggaran dengan anggaran sebesar Rp 48.500.000,- (Rupiah Murni).

11. Program Prioritas Polri

a. Program Prioritas Polri TA. 2021

NO/ KODE	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ALOKASI (DALAM RIBUAN)	KET
1	2	3	4	5	6	7
01	Program Lidik Sidik Tindak Pidana	Terciptanya rasa aman terhadap Kejahatan Konvensional, Kejahatan Transnasional, Kejahatan terhadap kekayaan negara dan Kejahatan Berimplikasi Kontinjensi.			1.907.186	
			Persentase pengungkapan tindak pidana konvensional.	62 %		
			Persentase pengungkapan tindak pidana transnasional.	48 %		
			Persentase pengungkapan tindak pidana terhadap kekayaan negara,	45 %		
			Persentase peningkatan pengungkapan tindak pidana yg berimplikasi kontinjensi.	25 %		
3142	Penindakan TP umum	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara TP umum	% penyelesaian TP Umum	214 perkara	1.089.442	
3144	Penindakan TP narkoba	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara TP narkoba	% penyelesaian TP Narkoba	12 perkara	479.487	
3146	Penindakan TP korupsi	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara TP korupsi	% penyelesaian TP korupsi	4 perkara	269.636	
4343	Penindakan TP laka Lantas	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara TP laka lantas	% penyelesaian TP laka lantas	59 perkara	54.656	
5082	Bin Opsnal Lidik Sidik TP	Meningkatkan Kerma Bin opsnal Lidik Sidik TP	Jumlah bantuan penanganan TP	10 operasi	5.640	

1	2	3	4	5	6	7
5086	Pengawasan penyidikan	Terlaksananya pengawasan penyidikan	Jumlah pengawasan penyidikan	6 laporan	8.325	
02	Program Peningkatan modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	Mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui keterse-diaan sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas	Prosentase/jmlah kecukupan keter sediaan Sarpras pendukung fasilitas guna memenuhi Standar Pelayanan Kamtibmas Prima	20.53%	3.202.011	
5059	Dukma Sarpra	Terlaksananya layanan perkantoran	Jumlah layanan perkantoran	1 layanan	3.202.011	
03	Program Harkamtib mas	Menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berkadar tinggi, kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api dan bahan peledak.			7.869.204	
		Mengembangkan langkah-langkah strategi, dan mencegah suatu potensi gangguan keamanan baik kualitas maupun kuantitas, sampai kepada penanggulangan sumber	Jumlah Kerjasama dengan lembaga kepolisian di Luar Negeri	8 Kerma		
		Memperluas kerja sama bidang keamanan, pendidikan dan pelatihan dengan kementerian/ lembaga baik dalam maupun luar negeri.	Jumlah kerjasama keamanan dengan komponen masyarakat.	4 kerma		
		Mendekatkan Polisi dengan berbagai komunitas masyarakat agar terdorong bekerja sama dengan Kepolisian secara proaktif dan saling mengandalkan untuk membantu tugas Kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban bersama (Community Policing).	Jumlah Kasat/ Kanit Binmas yang telah mendapat kan pelatihan Polmas	20 org		
		Memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan c	Jumlah Kriminalitas yang dapat ditindak oleh fungsi Baharkam Polri	89 kasus		
		Menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berkadar tinggi,kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api dan bahan peledak.	Jumlah kegiatan pengaturan penjagaan patroli dan pengawalan di jalan raya	5.936.880 Kegiatan		
			Jumlah Patroli perairan dan udara di seluruh wilayah hukum RI	0 kapal		
			Jumlah pengamanan objek vital/ objek vital	12 Bulan		

			nasional dan VVIP.	Layanan		
			Jumlah Patroli di tempat-tempat wisata dan melibatkan satwa anjing dan kuda	273 Giat Patroli		
			Jumlah Efisiensi, pelaksanaan mobilisasi pasukan bersenjata	0 Kali		
			Prosentase ke mampuan fungsi brimob merata di seluruh satuan brimob pusat dan daerah	0 %		
			Prosentase modernisasi sistem peralatan utama dan peralatan khusus yang mendukung gul Kamdagri	49 %		
			Jumlah dokumen dan hasil analisa	160 rekomen dasi bijakan	158.959	
			Jumlah operasi pencegahan potensi kejahatan berkadar tinggi biang politik	655 rekomen dasi kebijakan	228.917	
			Jumlah operasi pencegahan potensi kejahatan berkadar tinggi biang ekonomi	479 rekomen dasi kebijakan	201.054	
			Jumlah operasi pencegahan potensi kejahatan berkadar tinggi biang Sosbud	559 rekomen dasi kebijakan	231.093	
			Jumlah operasi pencegahan potensi kejahatan berkadar tinggi biang Kamneg	729 rekomen dasi kebijakan	508.170	
			Jumlah Kerma dengan K/L/ instansi terpusat dan daerah	0	0	
3128	Dukma Harkamtibmas	Terciptanya situasi yang aman di masyarakat	Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	2.264.120	
3130	Bin Yan fungsi Sabhara	Meningkatkan pegamanan kegiatan masyarakat	Jumlah layanan fungsi Sabhara	365 operasi	712.212	
3131	Penyelenggaraan pegamanan objek vital	Meningkatkan keamanan objek vital	Jumlah pengamanan objek vital nasional dan VVIP	408 operasi	179.989	
3133	Peningkatan pelayanan Kamselmas di bidang Lantas	Meningkatkan pelayanan pengaturan, pengawalan dan patrol alam rangka kamseltibcarlantas	Jumlah pelayanan pengaturan, pengawalan dan patrol alam rangka kamseltibcarlantas	12.967 layanan	782.119	
5076	Binpotkam	Terselenggaranya kerma antara Polri masyarakat dalam Haktibmas	Penempatan (satu) bhabimkamtibmas di setiap Desa	1.364 laporan	1.819.933	

			secara bertahap			
5080	Pengendalian Operasi Kepolisian	Terlaksananya penanggulangan gangguan Kamtibmas	Jumlah Kegiatan pengendalian operasi kepolisian	5 operasi	782.628	
04	Program dukungan manajemen	Menyelenggarakan fungsi Manajemen kinerja Polri secara optimal dengan melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pelayanan internal dan pembayaran gaji yang dilaksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan terintegritas	Jumlah kebijakan yang dapat mengoptimalkan unit kerja pelaksana teknis		29.663.718	
		Mewujudkan Polri yang profesional, transparan dan akuntabel dalam rangka good governance dan celan government sebagai implementasi reformasi Polri	% kebijakan yang berpihak pada masyarakat	85 %		
		Menyelenggarakan pengkajian, penelitian pengembangan yang berhubungan dengan teknologi Kepolisian untuk mendukung tugas kepolisian agar memenuhi standar peralatan utama dan peralatan teknis Polri yang terjangkau oleh produksi dalam negeri	% pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	92 %		
		Menyelenggarakan pembinaan dan advokasi hukum serta membangun landasan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Polri selaku pelindung, pengayom dan pelayanan	% unit kerja yang menerapkan administrasi secara akuntabel	90 %		
			% kecukupan operasional pelaksanaan tugas pelayanan Internal	84 %		
			% hasil riksa yang telah ditindaklanjuti.	91 %		
			% tindak lanjut terhadap Dumas	79 %		
			Menyelenggarakan pengkajian, Litbang yang berhubungan dengan teknologi Kepolisian untuk mendukung tugas Kepolisian agar memenuhi standar peralatan utama dan peralatan teknis Polri yang terjangkau oleh produksi Dagri	80 Kebijakan		
			Jumlah dan jenis peralatan utama serta peralatan teknis Polri yang memenuhi standar keamanan Internasional yang dilaksanakan oleh Litbang Polri	2 Peralatan		
			Jumlah penyusunan dan pengkajian	69 Naskah		

			perundang-undangan			
			Jumlah Bantuan hukum/saksi Pen terjemah/ biaya pengacara/ penye lesaian hukum	342 Bantuan Hukum		
			Jumlah pendapat dan saran hukum yang akan dibuat	5.276 Naskah		
			Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	672 Naskah		
			% pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	92 %		
3070	Penmas	Terlaksananya informasi Kepolisian kepada masyarakat	% informasi Kepolisian kepada masyarakat	1 Yan	66.963	
3073	Dukungan pelayanan Internal perkantoran Polri	Terlaksananya pelayann Polri	Jumlah dukungan layanan perkantoran	1 layanan	29.469.132	
3088	Pertanggung jawaban profesi	Terwujudnya pemuliaan profesi anggota Polri	% penyelesaian kode etik profesi Polri	14 laporan	14.190	
3089	Penyelenggaraan Pengamnan internal Polri	Terwujudnya Pengamanan Internal Polri	% penyelesaian kode etik profesi Polri	7 laporan	6.512	
3090	Penegakan Tatibplin Polri	Terselenggaranya tata tertib dan disiplin Polri	% pelanggaran disiplin	7 lap	13.000	
3091	Penyelenggaraan Wasrik	Terlaksananya Wasrik terhadap organisasi polri sesuai dnganketentuan yang berlaku	Jumlah laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang menjadi objek Wasrik	4 lap	18.221	
3155	Kerjasama dan Penyuluhan Hukum	Terlaksananya peraturan perundang-undangan Harkamtibmas	Jumlah Peraturan	5 Peratur an	27.200	
5054	Manajemen anggaran	Terlaksananya pelaksanaan manajemen anggaran	Jumlah layanan manajemen	97 layanan	48.500	

b. Program Prioritas Nasional Tahun 2021:

- 1) mengakomodir kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan termasuk tunjangan kinerja rekrutmen anggota Polri T.A. 2021;
- 2) kegiatan operasional anggaran perkantoran (antara lain: biaya pemeliharaan, BMP, daya dan jasa serta keperluan perkantoran);
- 3) kegiatan fungsi teknis kepolisian, berupa: deteksi potensi gangguan keamanan, pencegahan dan penanggulangan keamanan, pembinaan pelayanan dan perlindungan masyarakat, terorisme, korupsi, Narkoba perdagangan orang, keamanan dalam negeri, Kamtibmas, keamanan laut, kejahatan siber dan penegakan hukum lainnya serta untuk mendukung tercapainya proyek prioritas nasional 2021;
- 4) penguatan sarana prasarana dalam rangka meningkatkan pelayanan publik Polri, penanganan gejolak sosial, penanganan kasus menonjol, terorisme, berita hoaks dan penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional,

kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan penanganan peristiwa yang berimplikasi kontinjensi serta pembangunan perumahan dan kesehatan bagi personel Polri;

- 5) melaksanakan pelatihan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kapabilitas personel Polri, baik di bidang fungsi pembinaan maupun operasional agar semakin profesional modern dan terpercaya;
- 6) meningkatkan kegiatan preemtif dan preventif secara maksimal dengan mengoptimalkan petugas Bhabinkamtibmas melalui strategi Polmas dalam menghadapi ancaman gangguan kamtibmas;
- 7) meningkatkan kegiatan keamanan laut pada poros maritim dengan memperkuat satuan Polair baik di tingkat Polda maupun kewilayahan;
- 8) meningkatkan pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli pada tempat-tempat dan jam rawan gangguan Kamtibmas diwilayah Polres Sumbawa Barat;
- 9) melaksanakan penyusunan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Polri serta pemberian advokasi terhadap institusi Polri, anggota Polri maupun keluarga Polri;
- 10) mengakomodir 7 kegiatan Program Prioritas Kapolri;
- 11) pemberian tambahan nutrisi, vitamin dalam meningkatkan imun anggota dan pemberian santunan pada personil yang terkena *Covid-19* di jajaran Polres Sumbawa Barat ;

BAB IV
PENUTUP

12. Penutup

Demikian Revisi Rencana Kerja Polres Sumbawa Barat Tahun 2021 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas Polres Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2021.

Dikeluarkan di : Taliwang
Pada tanggal : 31 Agustus 2021
KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUMBAWA BARAT



HERU MUSLIMIN, S.T.K., M.I.P.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78051226

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESOR SUMBAWA BARAT



RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
POLRES SUMBAWA BARAT
T.A. 2021

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
 RESOR SUMBAWA BARAT

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) POLRES SUMBAWA BARAT T.A. 2021

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2021	KET
1	2	3	4	5	6
SI	Keamanan dan ketertiban Kab. Sumbawa Barat	IKU	Indeks keamanan dan ketertiban Kabupaten Sumbawa Barat	2.80	
SS1	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat KSB	IKU1	Indek Harkamtibmas Kab. Sumbawa Barat	60.15	
SS2	Peneggakan hukum yang berkeadilan	IKU2	Indeks Gakkum	71.00	
SS3	Profesionalisme SDM	IKP1	Indeks profesionalitas SDM Polres KSB	37.00	
SS4	Moderniasi Teknologi Polres Sumbawa Barat	IKP2	Prosentase pemenuhan Alkom Polres Sumbawa Barat	46%	
		IKP3	Prosentase pemenuhan pembangunan Polres Sumbawa Barat	50%	
		IKP4	Prosentase pemenuhan ketersediaan ADK pada almatsus Polres Sumbawa Barat	50%	
		IKP5	Prosentase kontra berita negative di Polres Sumbawa Barat	50%	
SS5	Sistem pengawasan Polres Sumbawa Barat yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintah yang bersih dan melayani	IKP6	Nilai AKIP Polres Sumbawa Barat	75.55	
		IKP7	Nilai RBP Polres Sumbawa Barat	49.40	
		IKP8	Indeks kepuasan layanan kepolisian (IKLK) di Polres Sumbawa Barat	48.50	

		IKP9	Nilai kinerja anggaran Polres Sumbawa Barat	98.67	
		IKP10	% Penanganan pengaduan masyarakat Polres Sumbawa Barat	60%	
		IKP11	% Penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polres Sumbawa Barat	66.8%	

Taliwang, 31 Agustus 2021

KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUMBAWA BARAT



HERU MUSTAMIN, S.I.N., M.I.P.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78051226

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESOR SUMBAWA BARAT



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/949/VIII/REN.1.3./2021

Pertimbangan: bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyusunan Revisi Rencana Kerja Polres Sumbawa Barat T.A. 2021, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
 7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Daerah;
 8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Tingkat Polres dan Polsek;
 9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 10. Surat Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Nomor: B/4763/VII/REN.3.1./2021/Srena tanggal 10 Juli 2021 perihal *Refoecussing* dan realokasi belanja Polri T.A. 2021;

Untuk,...

11. Surat Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Nomor: B/4780/VII/REN.3.1./2021/Srena tanggal 12 Juli 2021 perihal pagu *refoecussing* dan realokasi belanja Polri T.A. 2021 tahap III Satker Mabes Polri dan Polda jajaran.

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT DAN JABATANNYA SEBAGAIMANA YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

- Untuk :
1. disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai tim Pokja penyusunan **Revisi** Rencana Kerja Polres Sumbawa Barat T.A. 2021;
 2. mengadakan koordinasi dan kerja sama sebaik-baiknya dengan unsur terkait;
 3. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Taliwang
pada tanggal : 27 Agustus 2021
KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUMBAWA BARAT


HERU MUSLIM, S.I.K. M.I.P.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78051226

DAFTAR TIM POKJA PENYUSUNAN REVISI RENJA POLRES SUMBAWA BARAT T.A. 2021

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	
			STRUKTURAL	TIM POKJA
1	2	3	4	5
1	HERU MUSLIMIN, S.I.K., M.I.P.	AKBP	KAPOLRES	PENANGGUNGJAWAB
2	JAMALUDDIN, S.Sos.	KOMPOL	WAKAPOLRES	PENGARAH
3	TAUHID	AKP	PS. KABAG REN	KETUA
4	I WAYAN EKA GUSWIRA D.	BRIPTU	BAMIN PROGRAR	SEKRETARIS
5	IWAN SUGIYANTO, S.H.	AKP	PS. KABAG OPS	WAKIL KETUA/ PENANGGUNGJAWAB BIDANG OPS
6	IBRAHIM	KOMPOL	KABAG SUMDA	PENANGGUNGJAWAB BIDANG SDM
7	ARMAN WIJAYA	AKP	PS. KABAG LOG	PENANGGUNGJAWAB BIDANG LOGISTIK
8	I MADE SUSILA ARTANA	AKP	KASAT INTELKAM	PENANGGUNGJAWAB FUNGSI INTELKAM
9	HILMI MANOSSOH P., S.I.K.	AKP	KASAT RESKRIM	PENANGGUNGJAWAB FUNGSI RESKRIM
10	MUH. FATONI,S.H.	AKP	KASAT RESNARKOBA	PENANGGUNGJAWAB FUNGSI RESNARKOBA
11	RAHMANSYAH	IPTU	KASAT BINMAS	PENANGGUNGJAWAB FUNGSI BINMAS
12	HASANUDDIN	IPTU	KASAT SAMAPTA	PENANGGUNGJAWAB FUNGSI SAMAPTA
13	I MADE SUGIARTA, S.H.	IPTU	KASAT LANTAS	PENANGGUNGJAWAB FUNGSI LANTAS
14	EKO BUDI HERIAWAN	BRIPKA	PS. KANIT PAMOBVIT	PENANGGUNGJAWAB FUNGSI PAMOBVIT
15	KARIYADI	IPTU	KASI PROPAM	PENANGGUNGJAWAB FUNGSI PROPAM
16	EDDY SOBANDI A., S.Sos	IPDA	KASI HUMAS	PENANGGUNGJAWAB FUNGSI HUMAS
17	HANDOKO	IPDA	KASI KUM	PENANGGUNGJAWAB FUNGSI HUKUM
18	ARIEF NURDIANTO	AIPDA	PS. KASITIPOL	PENANGGUNGJAWAB FUNGSI TIK
19	IKA HIDAYATI, S. Si	IPTU	KASI DOKKES	PENANGGUNGJAWAB FUNGSI DOKKES
20	DWI SETIONO	AIPTU	PS. KASI KEU	PENANGGUNGJAWAB FUNGSI KEUANGAN

1	2	3	4	5
21	SADRI	IPTU	KASAT TAHTI	PENANGGUNGJAWAB FUNGSI TAHTI
22	ERWIN KURNIADI	AIPTU	PS. KA SIUM	PENANGGUNGJAWAB FUNGSI SIUM
23	SYAHRUL WAHIDIN	IPDA	KA SPKT	PENANGGUNGJAWAB FUNGSI SPKT

Dikeluarkan di : Taliwang
pada tanggal : 27 Agustus 2021

KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUMBAWA BARAT



HERU M. SUDHIN, S.I.K., M.I.P.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78051226

REVISI
RENCANA KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA
(RENJA KL) VERSI BAPPENAS MANUAL
TAHUN ANGGARAN 2021

REVISI
REKAP 1
RENCANA KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA (RENJA KL)
T.A. 2021

I. KEMETERIAN/LEMBAGA: KEPOLISIAN RESOR SUMBAWA BARAT

II. VISI: Terwujudnya Nusa Tenggara Barat yang Aman dan Tertib.

III. MISI: Melindungan, Mengayomi dan Melayanan Masyarakat Sumbawa Barat

IV. PRIORITAS NASIONAL

NO	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2021
	NIHIL	0
TOTAL		0

V. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
	Kemanan dan Ketertiban Kabupaten Sumbawa Barat Indeks keamanan dan ketertiban masyarakat Kab. Sumbawa Barat	60,00	7,869,204
01	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Sumbawa Barat		
01.01	Indeks Harkamtibmas	60,15	
02	Layanan publik Polres Sumbawa Barat yang prima		
02.01	Indeks kepuasan layanan Publik Polres Sumbawa Barat	45,50	
03	Penegakkan hukum yang berkeadilan		
03.01	Indeks penegakkan hukum	70	
04	Profesionalisme SDM		
04.01	Indeks profesionalisme SDM Polres Sumbawa Barat	36,28	
04.02	Indeks kompetensi Diklat SDM Polres Sumbawa Barat	42	
05	Sarana dan prasarana yang modern		
05.01	Survey kepuasan penggunaan Alkom	45 (C)	
05.02	Prosentase penyelesaian perawatan Alkom	55%	

Prosentase.....

05.03	Prosentase ketepatan waktu melakukan perawatan Alkom	21%	
05.04	Prosentase pemenuhan pembangunan Polres	50%	
05.05	Prosentase pemenuhan ketersediaan ADK pada Almasus Polres	45%	
06	Efektivitas operasional		
06.01	Prosentase penanganan kasus	75%	
06.02	Prosentase pencegahan gangguan Harkamtibmas	50%	
07	Tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani		
06.02	Nilai AKIP	76,46	
06.03	Level Kapabilitas APIP	3	
06.04	Opini BPK atas LK	WTP	
06.05	Nilai RBP	47,65	
08	Akuntabilitas pengelolaan anggaran		
08.01	Nilai Kinerja anggaran	98,66	
08.02	Prosentase penyerapan anggaran	99%	
09	Regulasi dan system pengawasan yang efektif		
09.01	Prosentase penanganan pengaduan masyarakat	2,8%	
09.02	Prosentase penyelesaian masalah hukum	65,4%	

REVISI
REKAP 2 PER PROGRAM
RENCANA KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA (RENJA KL)

VI. PROGRAM DAN PENDANAAN (RIBU RUPIAH)

KODE	PROGRAM	RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
060.01.18	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	1,852,524	-	-	-	-	-	54,662	-	-	-	1,907,186
060.01.15	Program Modernisasi Almatsus dan Sarpras Polri	2,130,188						1,071,823	-	-	-	3,202,011
060.01.16	Program Profesionalisme Sumber Daya Manusia Polri	-						-	-	-	-	-
060.01.17	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	5,783,440					313,160	1,772,604	-	-	-	7,869,204
060.01.014	Program Dukungan Manajemen	29,663,718						-	-	-	-	29,663,718
TOTAL		39,429,870						2,899,089			-	42,642,119



Wang, 31 Agustus 2021

RESOR SUMBAWA BARAT

SLIMIN S.I.K., M.I.P.

RES BESAR POLISI NRP 78051226

REVISI
PROGRAM DAN PENDANAAN
RENCANA KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA (RENJA KL)
T.A. 2021

REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

- 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- 2 SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG
 01. Harkamtibmas Kab. Sumbawa Barat
 02. Layanan publik Polres Sumbawa Barat yang prima
 07. Tata kelola pemerintahan yang bersih terbuka dan melayani
 08. Akuntabilitas pengelolaan anggaran
 09. Regulasi dan sistem pengawasan yang efektif
- 3 PROGRAM
Program Dukungan Manajemen
- 4 UNIT ORGANISASI (ESELON 1):
Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat / Polres Sumbawa Barat
- 5 PRIORITAS

KODE	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2021 (RIBU)
Total		0

6 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
1	Menyelenggarakan fungsi Manajemen kinerja Polri secara optimal dengan melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pelayanan internal dan pembayaran gaji yang di laksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan terintegritas		
2	Mewujudkan Polri yang profesional, transparan dan akuntabel dalam rangka good governance dan celan government sebagai implementasi reformasi Polri		
3	Menyelenggarakan pengkajian, penelitian pengembangan yan berhubungan dengan eknologi Kepolisian untuk mendukung tugas kepolisian agar memenuhi standar perlatan utama dan perlatan teknis Polri yang terjangkau oleh produksi dalam negeri		
4	Menyelenggarakan pembinaan dan advokasi hukum serta membangun landasan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Polri selaku pelindung, penmgayom dan pelayanan		
01.01	Jumlah kebijakan yang Layanan dapat mengoptimalkan unit kerja pelaksanaan teknis	16 kebijakan	
01.02	% kebijakan yang berpihak pada masyarakat	85%	

PROSENTASE.....

01.04	% Rengar berdasarkan kerangka pengeluaran jangka menengah dengan kinerja secara	95%	
01.05	% pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	92%	
01.06	% unit kerja yang menerapkan administrasi secara aktual	90%	
01.07	% kecukupan operasional pelaksanaan tugas pelayanan internal	84%	
02.01	% hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti	91%	
02.02	% tindaklanjut terhadap pengaduan masyarakat	79%	
03.01	menyeleenggarakan pengkajian, penelitian dan pengemangan yang berhubungan dengan teknologi Kepolisian untuk mendukung tugas kepolisian agar memenuhi standar peralatan utama dan peralatan teknis Polri yang terjangkau oleh prosukdi dalam negeri	80 kebijakan	
03.02	Jumlah dan jenis peralatan utama serta peralatan teknis Polri yang memenuhi standar keamanan Internasional yang dilaksanakan oleh Litbang Polri	0 peralatan	
04.01	Jumlah penyusunan dan pengkajian perundang-undangan	5 dokumen	
04.02	Jumlah Bantuan hukum/saksi penterjemah/biaya yang akan dibuat	0 Bankum	
04.03	Jumlah pendapat dan saran hukum yang dilaksanakan	0 peraturan	
04.04	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	0 naskah	
Total			29,663,718

7 OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM/INDIKATOR OUT PROGRAM	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Terlaksananya layanan bidang keuangan, Humas Polri, kedokteran dan kesehatan, umum dan anggaran Polri	29,663,718
Total		29,663,718

KEGIATAN.....

8 KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
3068	Pelayanan Administrasi Keuangan Polri	-										-
3070	Penerangan Masyarakat	66,963									-	66,963
3071	Penyelenggaraan Teknologi Informasi	-									-	-
3072	Pelayanan kesehatan Polri	-									-	-
3073	Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri	29,469,132									-	29,469,132
3088	Pertanggungjawaban profesi	14,190									-	14,190
3089	Penyelenggaraan Pegamanan Internal Polri	6,512									-	6,512
3090	Penegakan Tata Tertib dan Disiplin Polri	13,000									-	13,000
3091	Penyelenggaraan pemeriksaan dan	18,221									-	18,221
3149	Pengelolaan multimedia	-									-	-
3154	Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum	-									-	-
3155	Peraturan Perundang-Undangan Harkamtibmas	32,000									-	27,200

Penyusunan.....

5051	Penyusunan Kebijakan	-								-		-
5053	RBP	-								-		-
5054	Manajemen Anggaran	48,500								-		48,500
5056	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	-								-		-
Total		29,668,518								-		29,663,718

Taliwang, 31 Agustus 2021

POLISIAN RESOR SUMBAWA BARAT



MUSLIMIN, S.I.K., M.I.P.

PARIS BESAR POLISI NRP 78051226

REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

- 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- 2 SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG
05. Sarana prasarana yang modern
- 3 PROGRAM
Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri
- 4 UNIT ORGANISASI (ESELON 1):
Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat
- 5 PRIORITAS

KODE	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2021 (RIBU)
Total		

6 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas		3,202,011
01.01	Prosentase/jumlah kecukupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas guna memenuhi standar Pelayanan Kamtibmas	20.53%	
Total			3,202,011

7 OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM/INDIKATOR OUT PROGRAM	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Layanan dukungan manajemen program Sarpras	3,202,011
01.01	Jumlah layanan	
Total		3,202,011

Pengembangan.....

8 KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
3084	Pengembangan peralatan Polri	-									-	-
5059	Dukungan manajemen dan teknik sarpras	2,130,188					1,071,823				-	3,202,011
5062	Pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri	-					-				-	-
	total	2,130,188					1,071,823				-	3,202,011

Taliwang, 31 Agustus 2021

KEPALA POLRI RESOR SUMBAWA BARAT



[Handwritten Signature]
 S.I.K., I.P.
 AJU. SAR POLISI NRP 78051226

**REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)**

- 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- 2 SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG
04. Profesionalisme Sumber Daya Manusia
- 3 PROGRAM
Program profesionalisme Sumber Daya Manusia Polri
- 4 UNIT ORGANISASI (ESELON 1):
Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat
- 5 PRIORITAS

KODE	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2021 (RIBU)
Total		

6 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Mewujudkan aparatur Polri yang profesional baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan memiliki kompetensi sesuai dengan idang tugasnya melalyu penyelenggaraan pendidikan Polri sehinga mampu mengemban tugas Polri secara profesional proporsional		-
02	Memberdayakan SDM Polri di bidang pengembangan karier, pembinaan rohani hingga pengakhiran dinas secara proporsional sesuai standar kompetensi		
01.01	Jumlah pendidik dan tenaga pendidik Diklat Polri yang emenuhi standar kompetensi melalui uji	1.146 orang	
01.02	Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan Polri berakreditasi	3 akreditasi	
01.03	Regulasi Diklat aparatur	3 regulasi	
02.01	Jumlah pengembangan kekuatan SDM Polri sesuai ABK Polri	445.780 orang	
02.02	Berkurangnya pelanggaran yang dilakukan oleh personel Polri	1.5%	
Total			-

Penyelenggaraan.....

7 OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM/INDIKATOR OUT PROGRAM	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Penyelenggaraan Dukma dan teknis pengembangan Didlat apartur Polri	-
01	Pelayanan perkantoran SDM	
01.01	Jumlah layanan	
TOTAL		-

8 KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
0001	Dukungan manajemen Profesionalisme Polri	-						-			-	-
Total		-						-			-	-

Taliwang, 31 Agustus 2021

KEPALA POLRI RESOR SUMBAWA BARAT



A. S.I.K., M.I.P.

A. SAR POLISI NRP 78051226

**REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)**

- 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- 2 SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG
01. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Kab. Sumbawa Barat
03. Layanan publik Polres Sumbawa Barat yang prima
06. Efektivitas operasional
- 3 PROGRAM
Program Harkamtibmas
- 4 UNIT ORGANISASI (ESELON 1):
Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat
- 5 PRIORITAS

KODE	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2021 (RIBU)
Total		

6 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Mengembangkan langkah-langkah strategis dan mencegah suatu potensuim gangguan keamanan baik kualitas maupun kuantitas samapai kepada penanggulangan sumber		
02	Memperluas kerjasama bidang keamanan, pendidikan pelatihan dengan Kementerian/Lembaga baik dalam maupun luar negeri		
03	Mendekatkan Polisi dengan berbagai kounitas masyarakat agar terdorong bekerja sama dengan Kepolisian secara proaktif dan saling mengandalkan untuk membantu tugas Kepolisian dalam menciptakan Kamtib bersama (Community Policing)		
04	Memelihara dan meningkatkan kondisi Kamtibmas agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam eraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan kriminalitas		
05	Menanggulangi gangguan Kamtibmas berkadar tinggi, kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api dan bahan peledak		

Jumlah.....

01.01	Jumlah kegiatan Intelijen yang dapat menurunkan potensi gangguan Kamdagri	624.664 giat	
01.02	Jumlah jaringan dibidang Ipoleksosbudhankam	1.210 jaringan	
01.03	Jumlah produk Intelijen yang dihasilkan	700.481 produk	
01.03	Jumlah produk Intelijen yang dihasilkan	700.481 produk	
02.01	Jumah kerja sama dengan departemen/instansi terpusat an daerah	11 kerma	
02.02	Jumlah kerjasama dengan lembaga kepoliisna luar negeri	8 kerma	
02.03	Jumlah kerjasama keamanan dengan komponen masyarakat	4 kerma	
03.01	Jumlah Kasat/Kanit binmas yang telah mendapat pelatihan Polmas	120 org	
03.02	Jumlah kriminalitas yang dapat ditindak oleh fungsi Baharkam Polri	89 kassus	
04.01	Jumlah kegiatan pengaturan penjagaan patroli dan pengawalan di jalan raya	5.936.880 giat	
04.02	Jumlah Patroli perairan dan udara di seluruh wilayah hukum RI	46 kapal	
04.03	Jumlah pengamanan objek vital/objek vital nasional dan VVIP	12 bln yan	
04.04	Jumlah patroli ditempat-tempat wisata dan melibatkan satwa anjing dan kuda	273 giat patroli	
05.01	Jumlah efesiensi pelaksanaan mobilisasi pasukan bersenjata	62 kali	
05.02	Propsentase kemampuan fungsi Brimob merata diseluruh SatuanBrimob pusat an daerah	97%	
05.03	Prosentase modernisasi sistem peralatan utama dan peralatan khusus yang mendukung penanggulangan Kamdagri	49%	
Total			7,869,204

7 OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM/INDIKATOR OUT PROGRAM	ALOKASI 2021 (RIBU)
0001	Terpeliharanya sistem keamanan ketertiban masyarakat (siskamtibmas) yang aman, tertib dan terkendali guna mewujudkan Kamdagri yang mantap	7,869,204
Total		7,869,204

Dukungan.....

8 KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
3112	Analisis keamanan	158,969						-			-	158,969
3114	Penyelenggaraan Strakamtib bidang Politik	227,622						1,295			-	228,917
3115	Penyelenggaraan Strakamtib bidang ekonomi	199,759						1,295			-	201,054
3116	Penyelenggaraan Strakamtib bidang sosial	289,798						1,295			-	291,093
3117	Penyelenggaraan Strakamtib bidang Kamneg	506,505						1,665			-	508,170
3120	Kerma Kamtib K/L	-						-			-	-
3128	Dukungan manajemen Harkamtibmas	2,167,380						96,740			-	2,264,120
3130	Pembinaan pelayanan fungsi Sabhara	-						712,212			-	712,212
3131	Penyelenggaraan pengaman Objek Vital	-						179,989			-	179,989
3133	Peningkatan pelayanan Kamselmas di bidang lintas	-						760,113			-	760,113
3134	Penyelenggaraan Kepolisian perairan	-						-			-	-
3150	Penyelenggaraan Strakamtib bidang kamsus	-						-			-	-

5076	Bin Potkam	1,801,933						18,000			-	1,819,933
5080	Pengendalian Operasi Kepolisian	469,468						-			-	469,468
5081	Pelacakan dan penangkalan Kamtib	-						-			-	-
5087	Penanggulangan Kamdagri	-						-			-	-
		5,821,434						1,772,604			-	7,869,204

Taliwang, 31 Agustus 2021
 KEPALA POLISI RESOR SUMBAWA BARAT

 A.J.L. SAR POLISI NRP 78051226

REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

- 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- 2 SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG
 01. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Kab. Sumbawa Barat
 02. Layanan publik Polres Sumbawa Barat yang prima
 03. Penegakkan hukum yang berkeadilan
 06. Efektivitas operasional
- 3 PROGRAM
Program penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana
- 4 UNIT ORGANISASI (ESELON 1):
Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat
- 5 PRIORITAS

KODE	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2021 (RIBU)
Total		

6 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Terciptanya rasa aman terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan berimplikasi kontijensi		1,907,168
01.01	% pengungkapan tindak pidana konvensional	62%	
01.02	% pengungkapan tindak pidana transnasional	48%	
01.03	% pengungkapan tindak pidana terhadap kekayaan negara	45%	
01.04	% peningkatan pengungkapan tindak pidana yang berimplikasi kontijensi	25%	
Total			1,907,168

Layanan.....

7 OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM/INDIKATOR OUT PROGRAM	ALOKASI 2021 (RIBU)
1	Layanan perkantoran Lidik Sidik	1,907,168
01.01	Jumlah layanan perkantoran	
Total		1,907,168

8 KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
3137	Dukma dan teknis Lidik Sidik TP	-										-
3142	Penindakan TP umum	1,089,442										1,089,442
3144	Penindakan TP Narkoba	479,487										479,487
3145	Penindakan Ekonomi Khusus	-										-
3146	Penindakan TP Korupsi	269,636										269,636
4343	Penindakan TP Laka Lantas	-					54,662					54,662
3151	Penindakan TP Siber	-										-
5082	Binops Lidik Sidik TP	5,640										5,640
5083	Penindakan TP Tertentu	-										-
5086	Pengawasan penyidikan	8,325										8,325
												1,907,168

31 Agustus 2021
 KEPALA RESOR SUN BAWA BARAT

 AJUN KUMARIS BESAR POLISI NRP 78051226